



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981

Telepon : (0474) Fax : (0474)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 71 /TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Grand Design Reformasi Birokrasi di Bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur harus menyusun peta proses bisnis;
 - b. Bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur harus menyusun peta proses bisnis;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instalasi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

- 15.Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 372 Tahun 2021 tentang Penetapan Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- 16.Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 373 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

KESATU : Menyusun Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Diktum Kesatu terdiri atas:

1. Peta Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan Peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung;
2. Peta Proses Bisnis Level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing masing proses level 0;
3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) merupakan penjabaran lebih rinci dari masing masing proses yang ada di level 1;
4. Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map) adalah Peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DINAS,



Drs. SUKARTI

Pada tanggal: Pembina Utama Muda

NIP. 196502101998031015

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

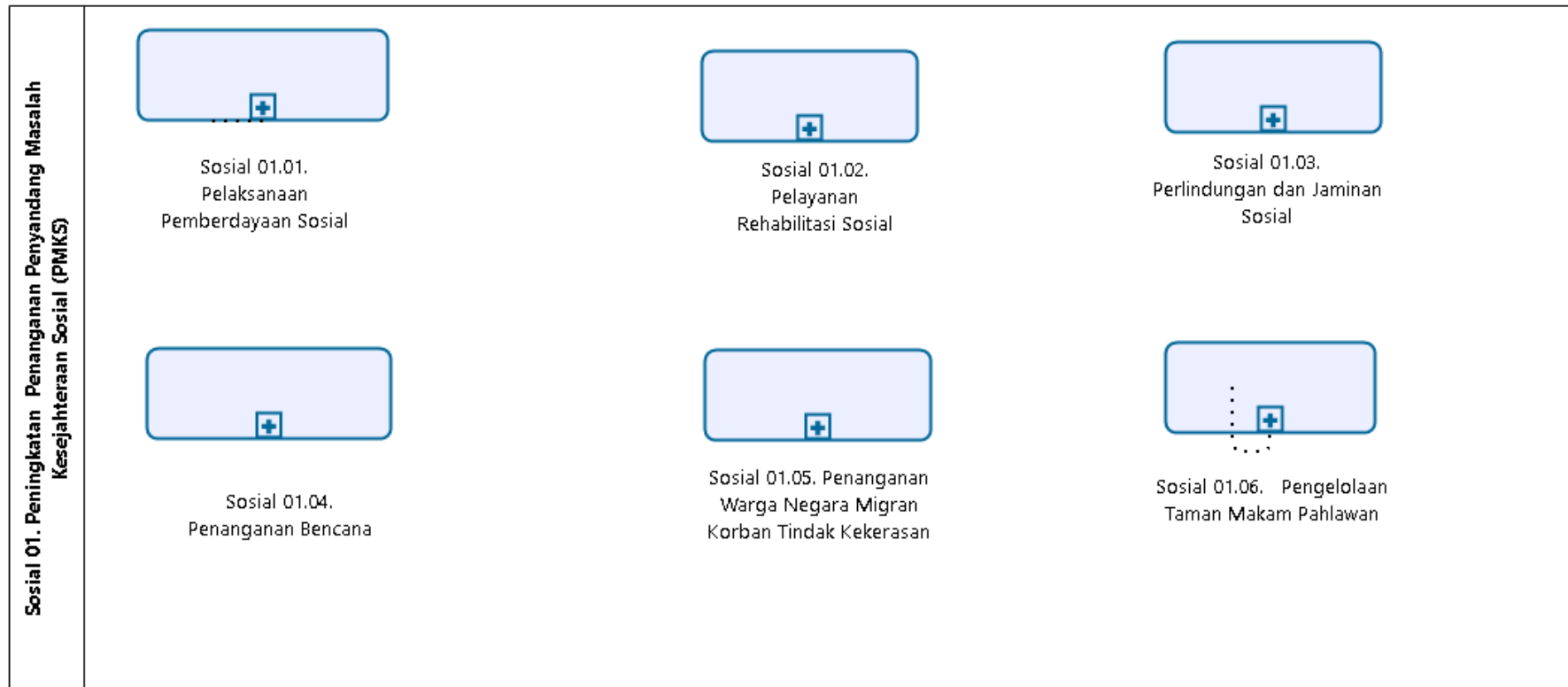
PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2021-2026

Bagan Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Level 0 : Sasaran Strategis

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UTAMA	 Sosial 01. Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	 Sosial 02. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	 Sosial 03. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	PENUNJANG	 Sosial 04. Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		

Level 1 (Program)



Sosial 01.01. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial



Sosial
01.01.01.Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Daerah Kabupaten/Kota

Sosial 01.02.Pelayanan Rehabilitasi Sosial



Sosial 01.02.01 Pelayanan
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlan

Sosial 01.03. Perlindungan dan Jaminan Sosial



Sosial 01.03.01.
Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Sosial 01.04. Penanganan Bencana



Sosial 01.04.01.
Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan
Sosial Kabupaten/Kota



Sosial 01.04.02.
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota

**Sosial 01.05. Penanganan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan**



Sosial
01.05.01.Pemulangan
Warga Negara Migran
Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Debark

Sosial 01.06. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan



Sosial 01.06.01.
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan Nasional

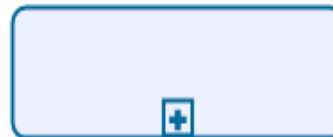
SOSIAL 02. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan



Sosial 02.01.
Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan



Sosial 02.02. Pengelolaan
Sistem Data Gender dan
Anak



Sosial 02.03 Peningkatan
Kualitas Keluarga

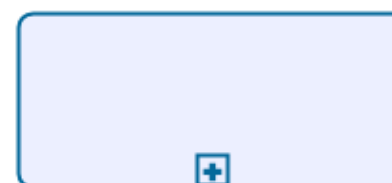


Sosial 02.04.
Pemenuhan Hak Anak

**Sosial 02.01 Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan**



Sosial 02.01.01
Pelebagaan
Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan K



Sosial 02.01.02
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan



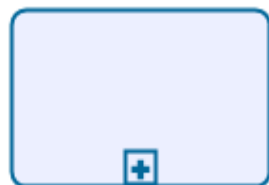
Sosial 02.02.01
Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender
dan Anak Dalam Kelemb

Sosial 02.03 Program Peningkatan Kualitas Keluarga



Sosial 02.03.01
Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak

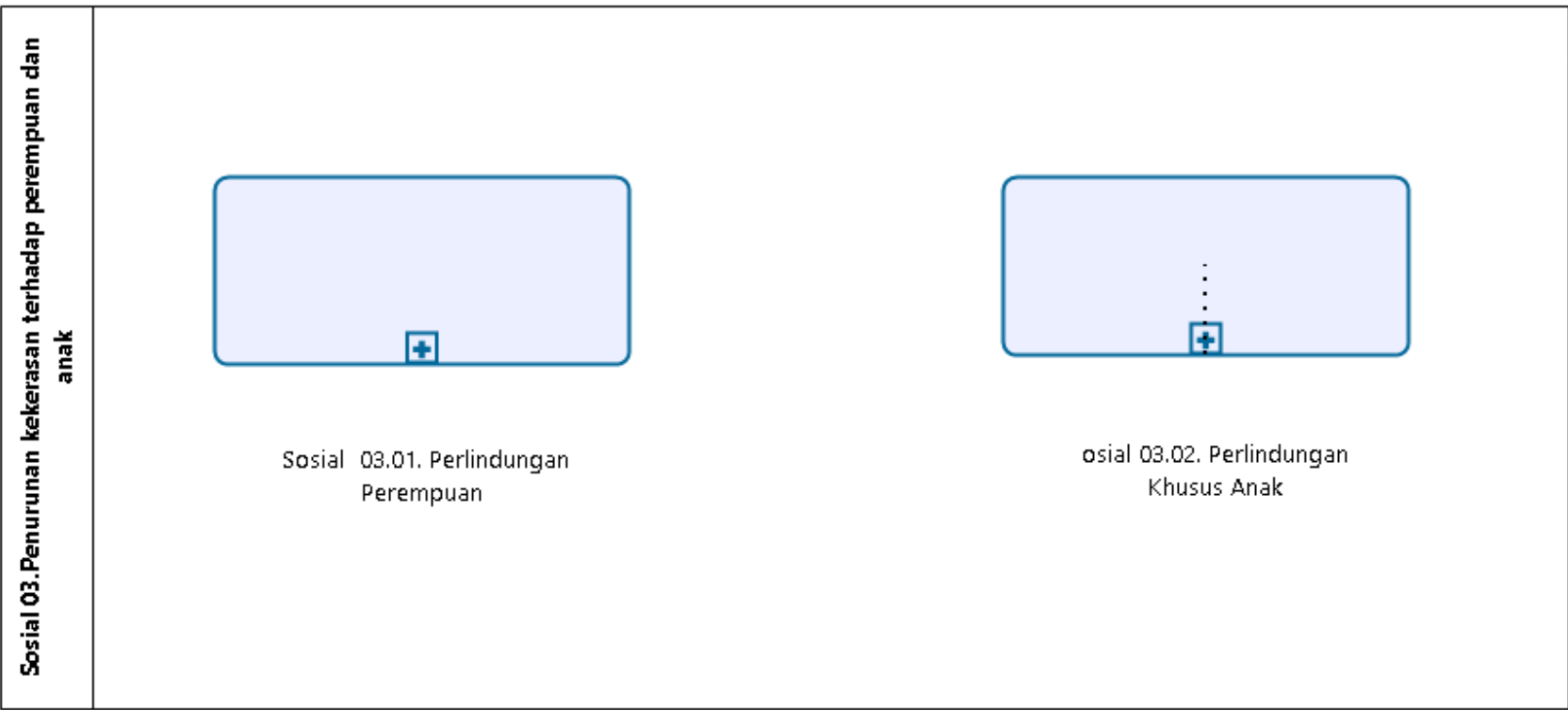
02.04 Program Pemenuhan Hak Anak



Sosial 02.04.01
Pelebagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabup



Sosial 02.04.02 Penguatan
dan Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewen



SOSIAL 03.01 Program Perlindungan Perempuan



Sosial 03.03.01
Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota



Sosial 03.03.02 Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota



Sosial 03.03.03 Penguatan
dan Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan
Perempuan Tingkat Daerah



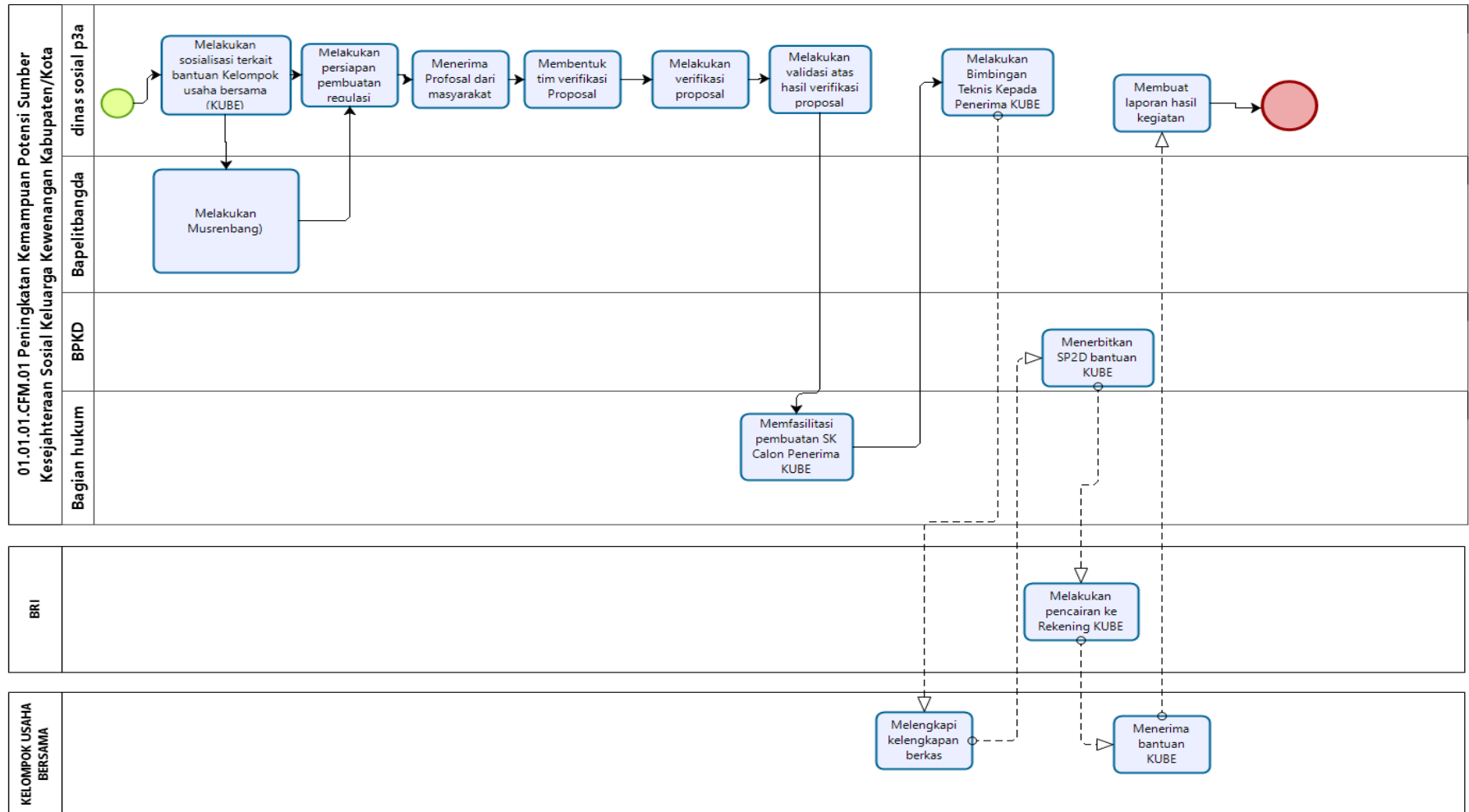
03.02.01 Pencegahan
Kekerasan Terhadap Anak
yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Kabupaten

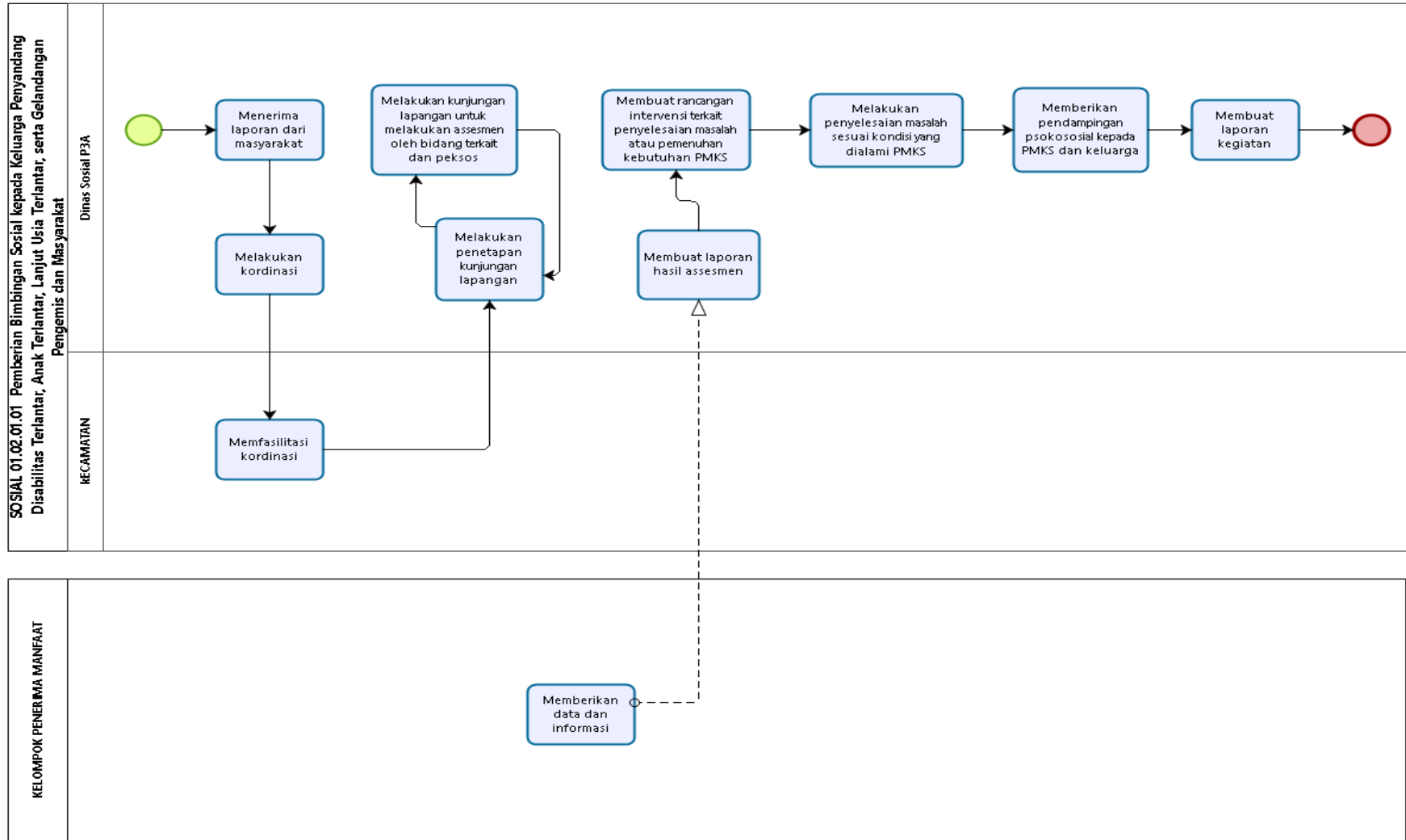
SOSIAL 04. Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah



Sosial 03.01. Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

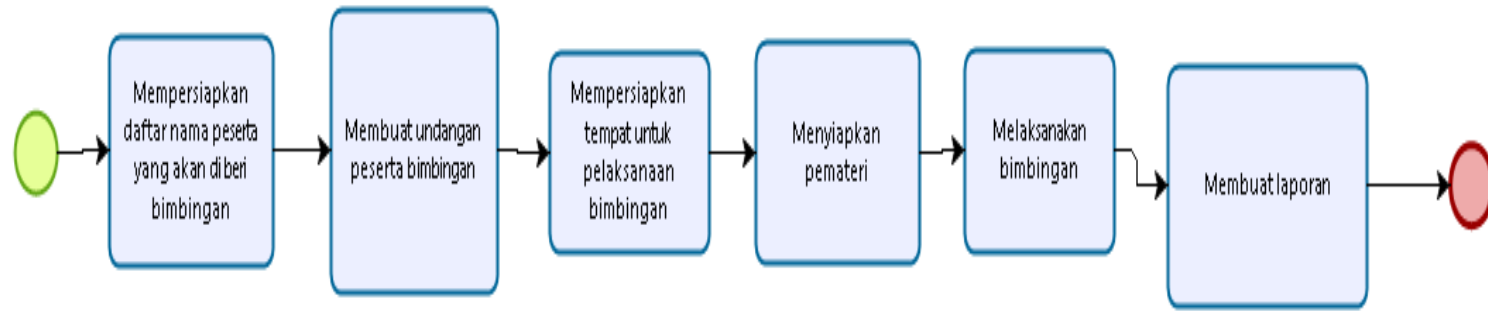
Level 1. Kegiatan

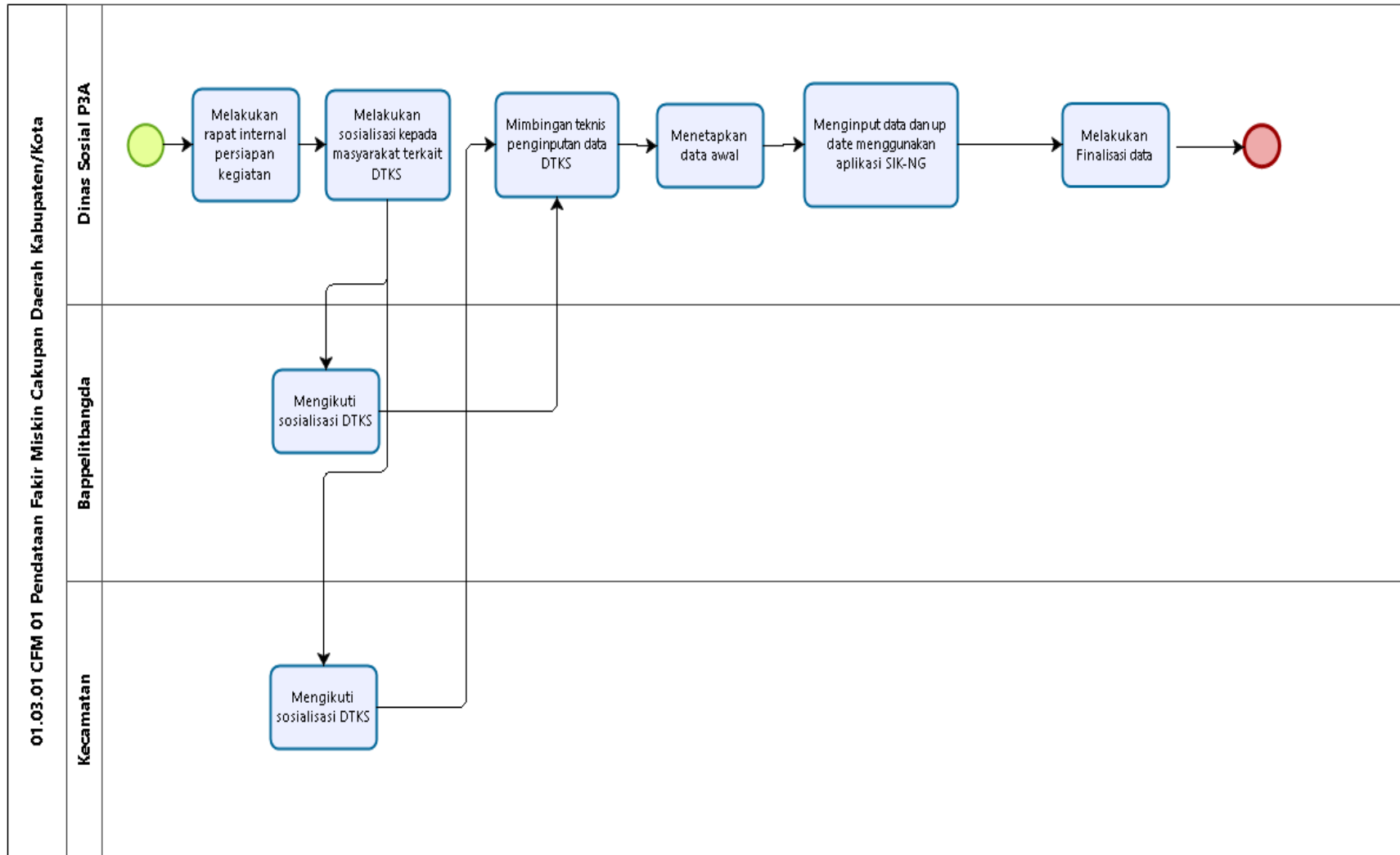


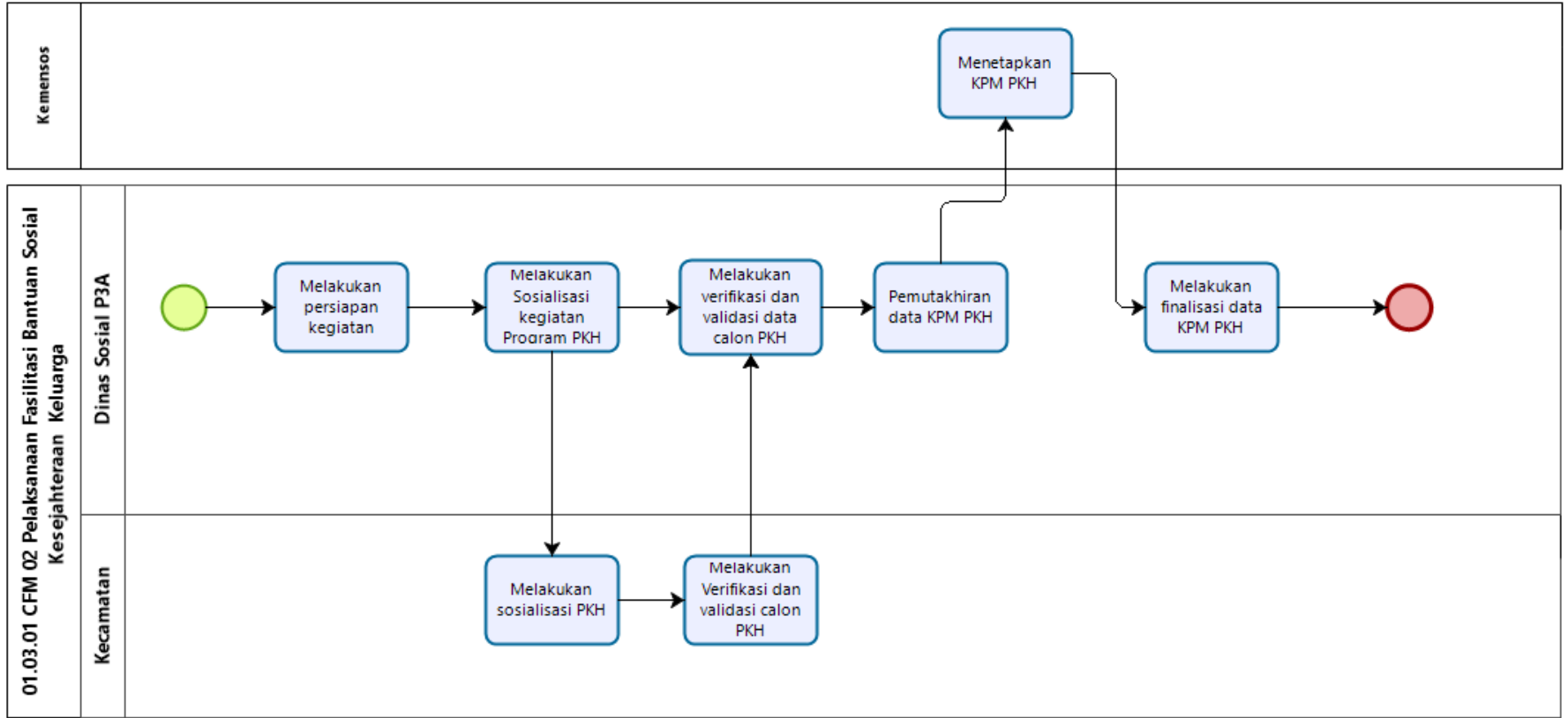


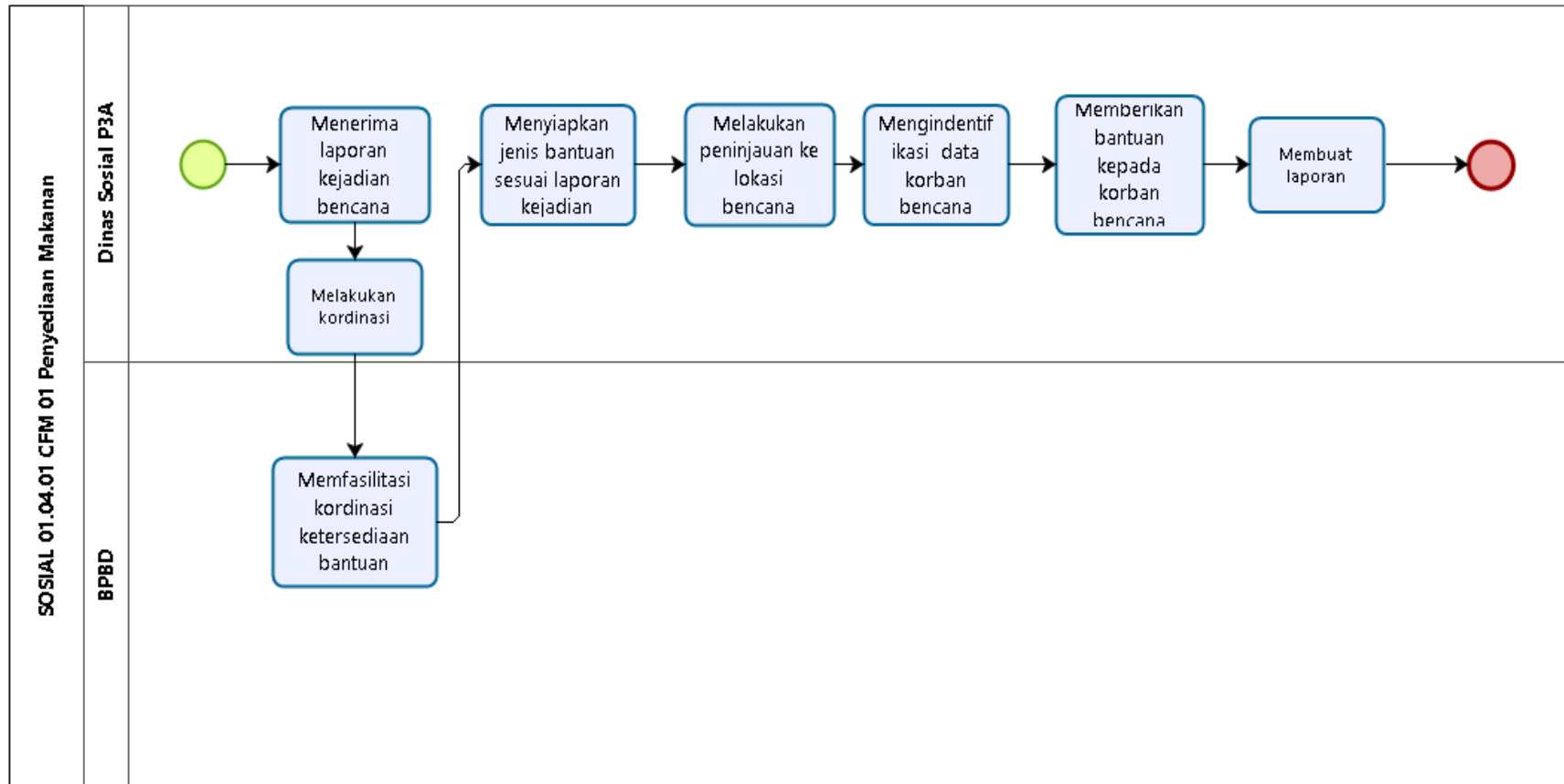
SOSIAL 01.02.01.CFM 03 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Dinas Sosial P3A





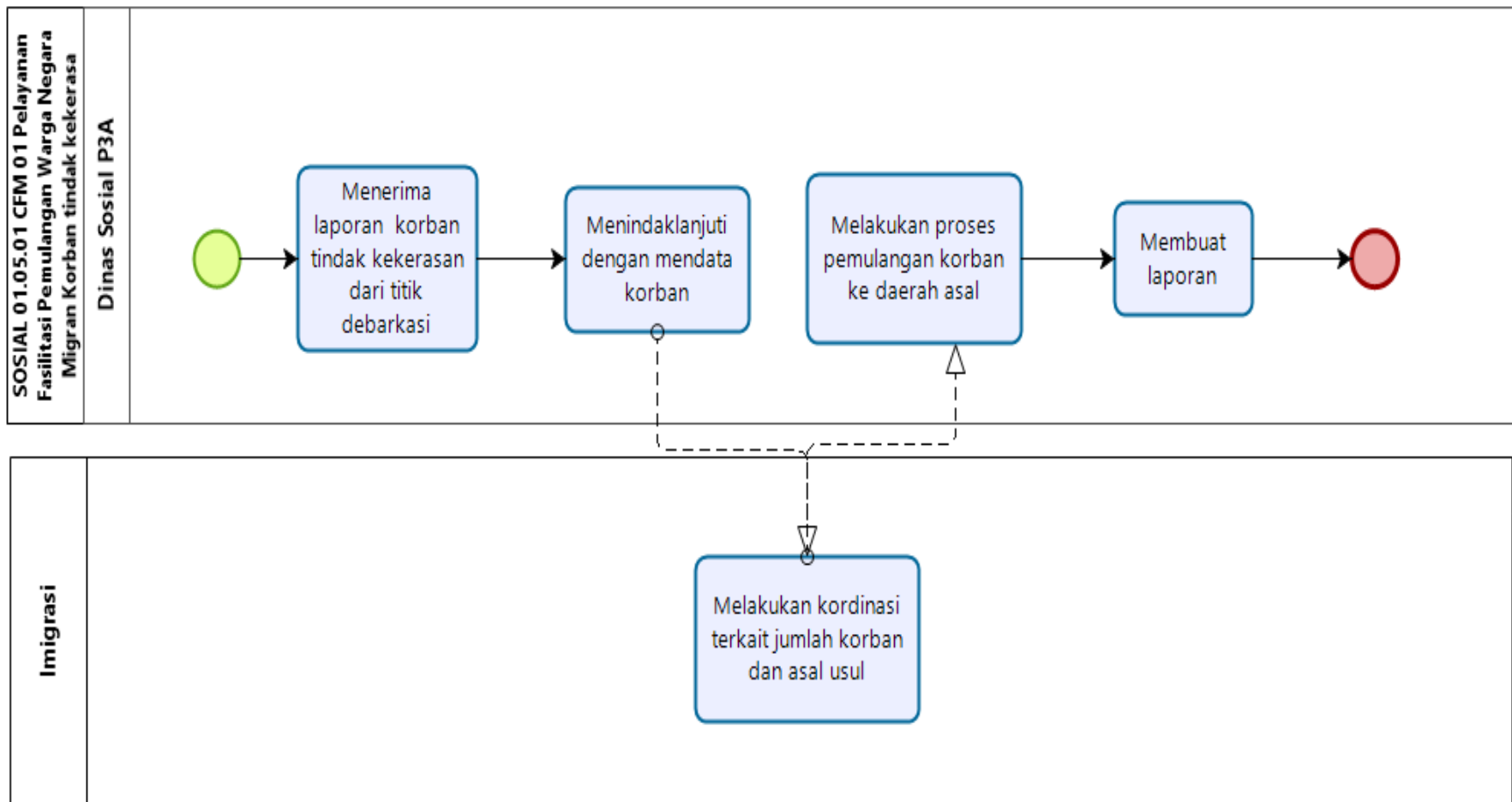




**SOSIAL 01.04.02 CFM 01 K.4.2.1.Pelaksanaan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana**

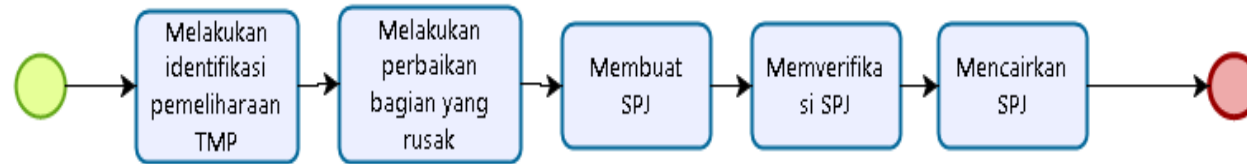
Dinas Sosial P3A

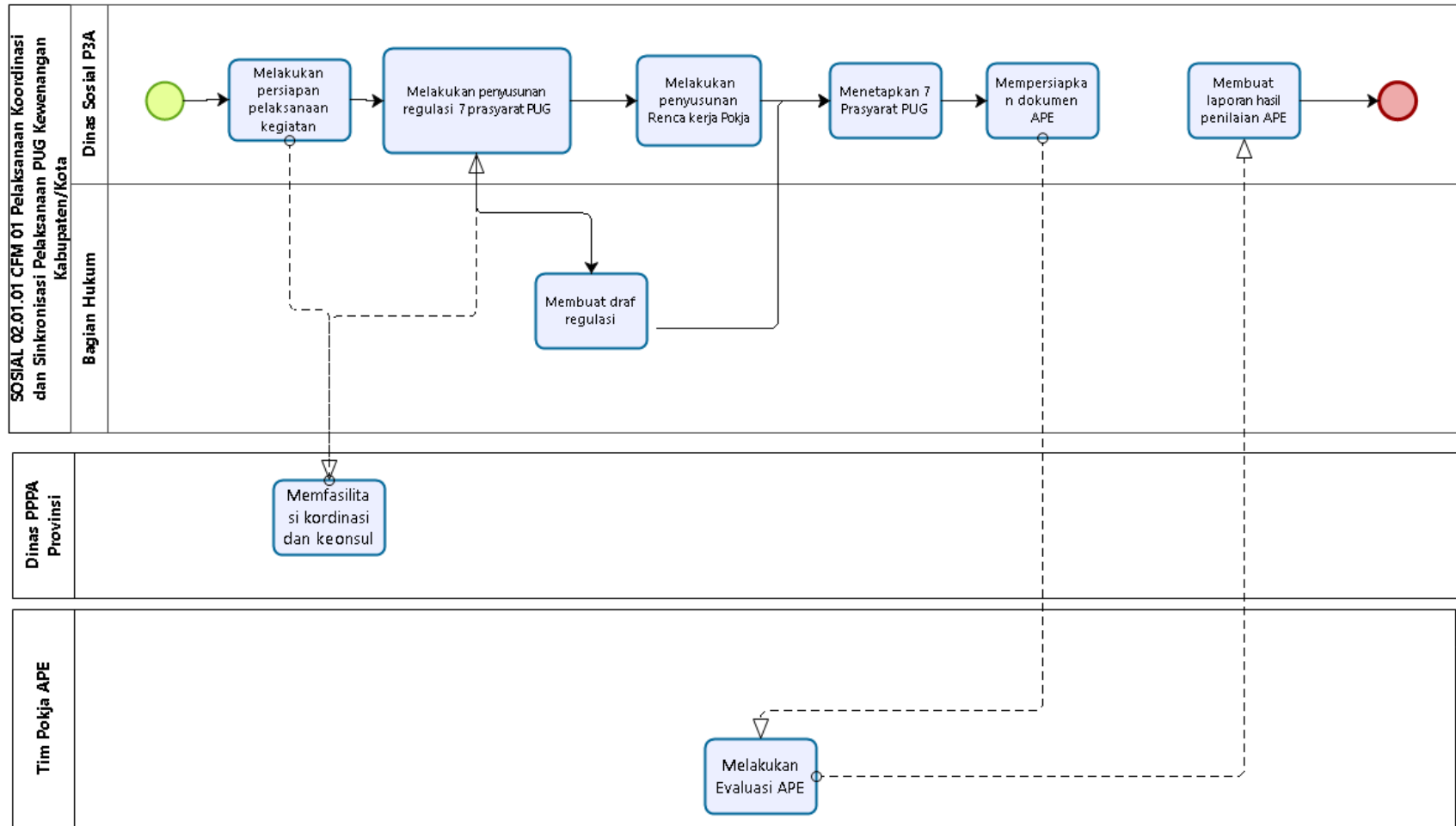


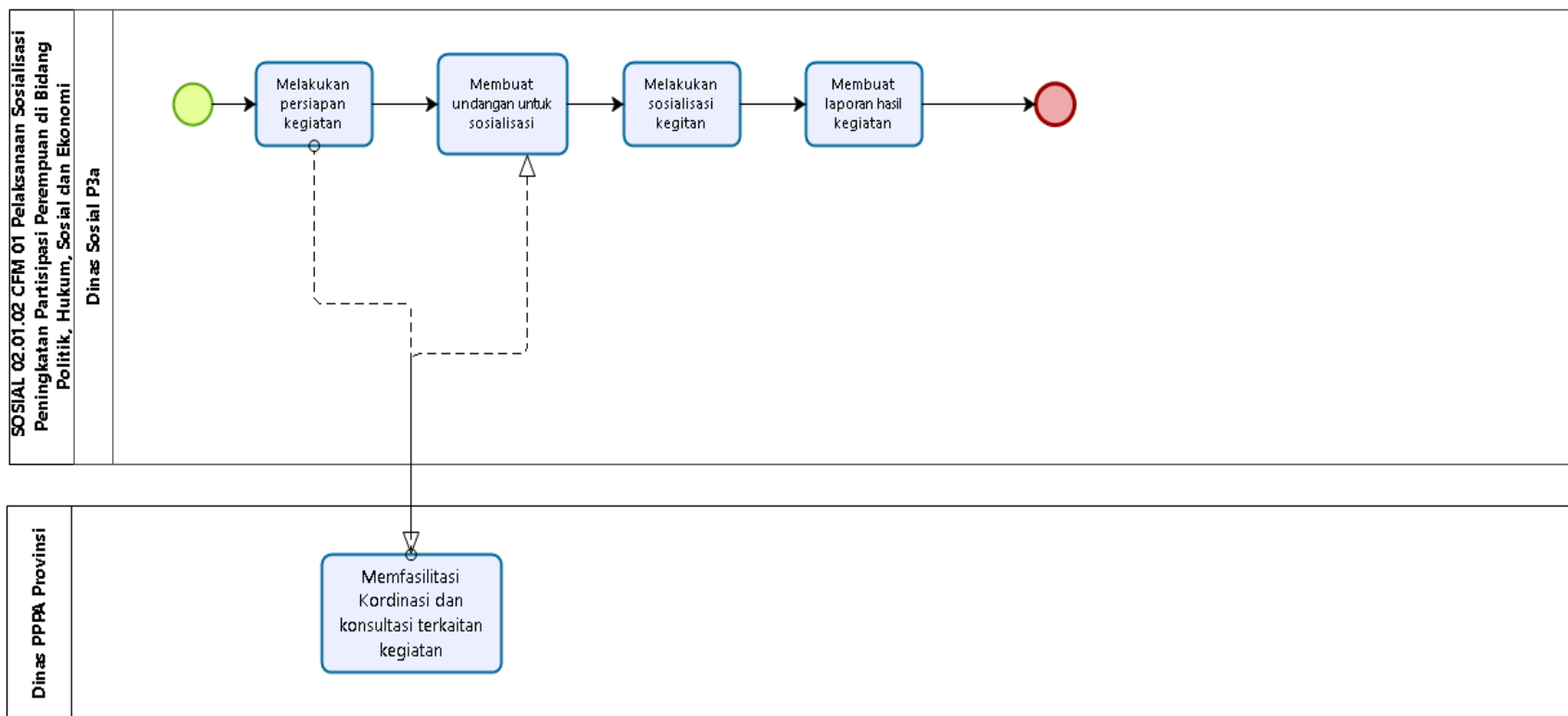


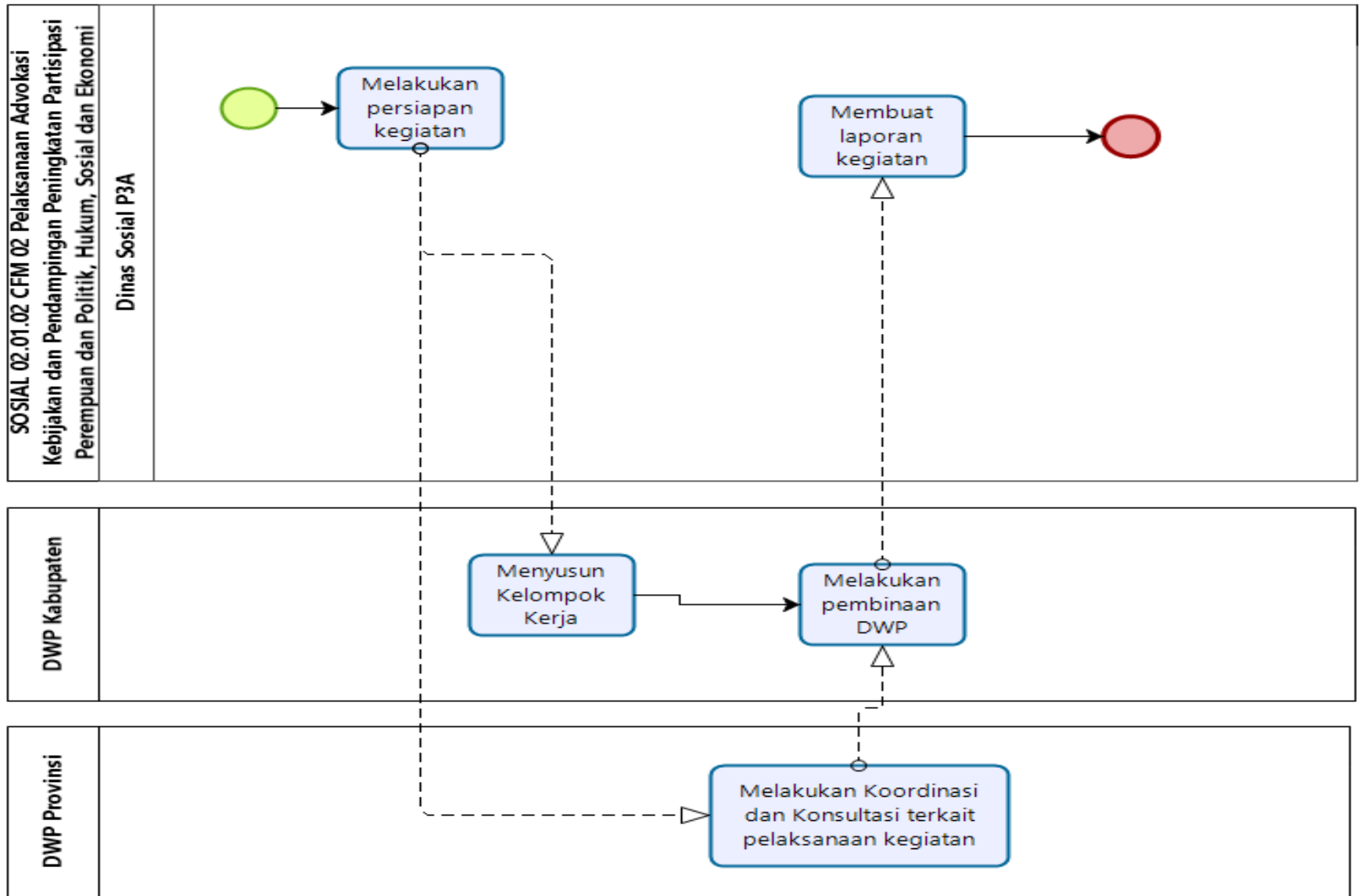
**SOSIAL 01.06.01 CFM 01 Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**

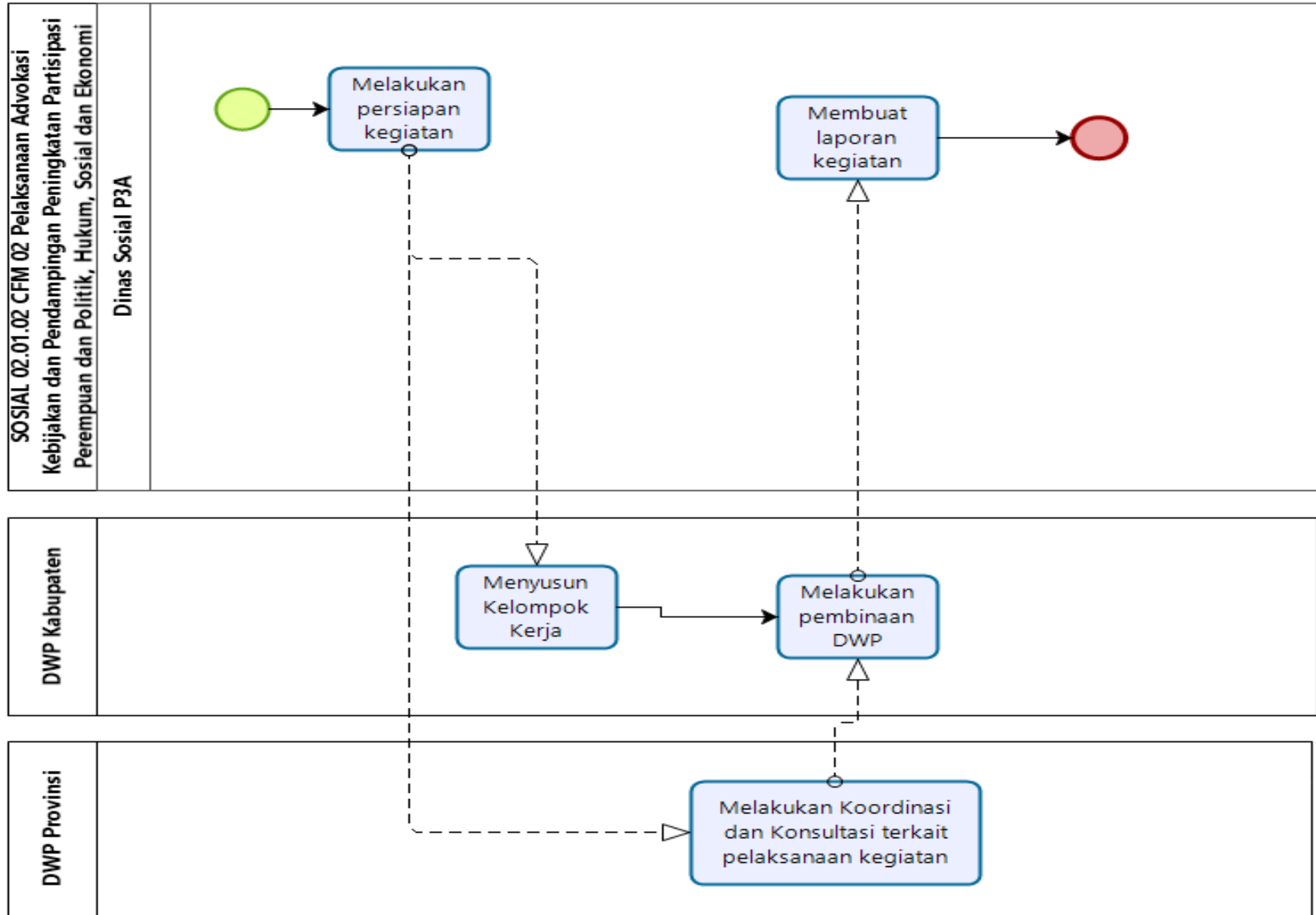
Dinas Sosial P3A

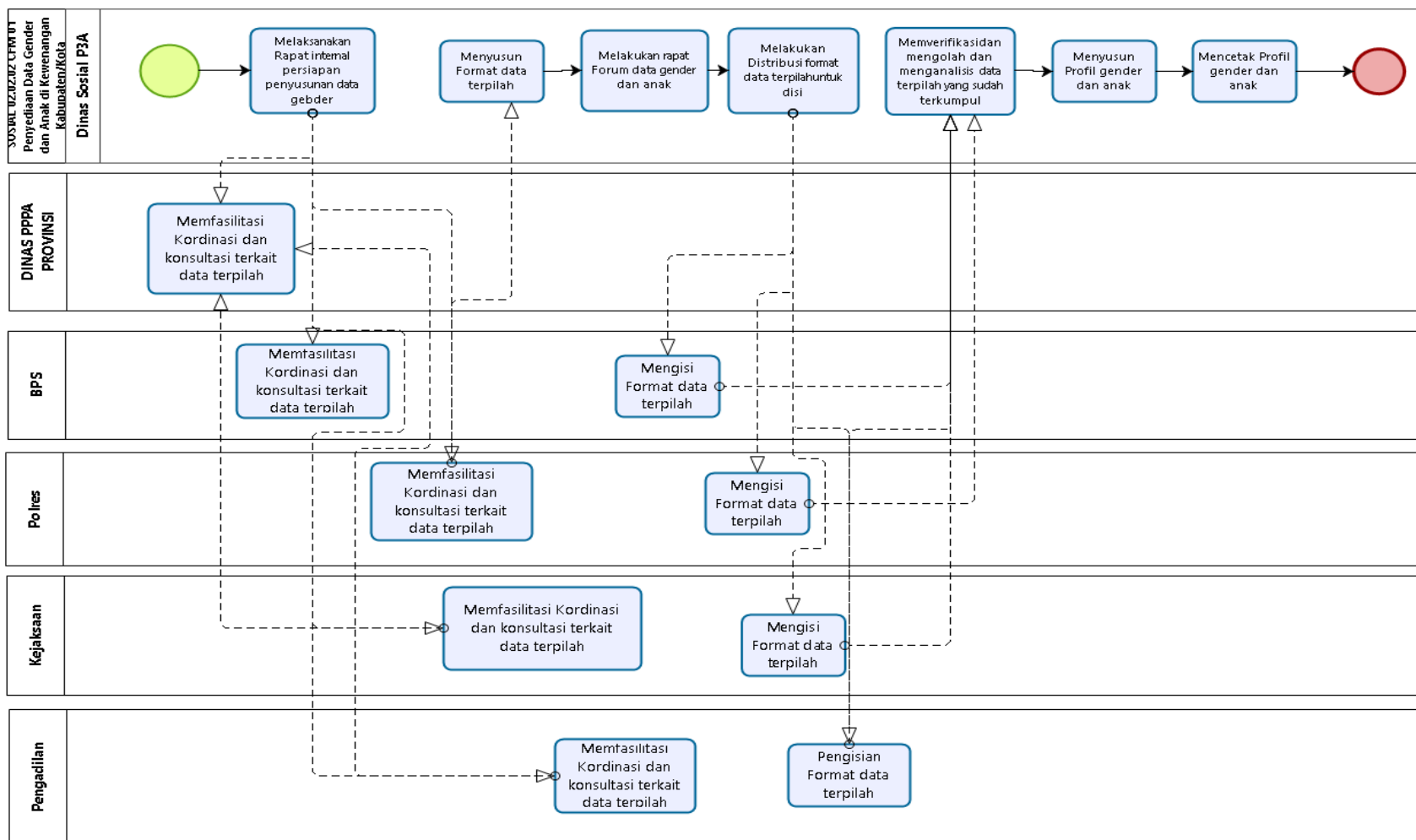


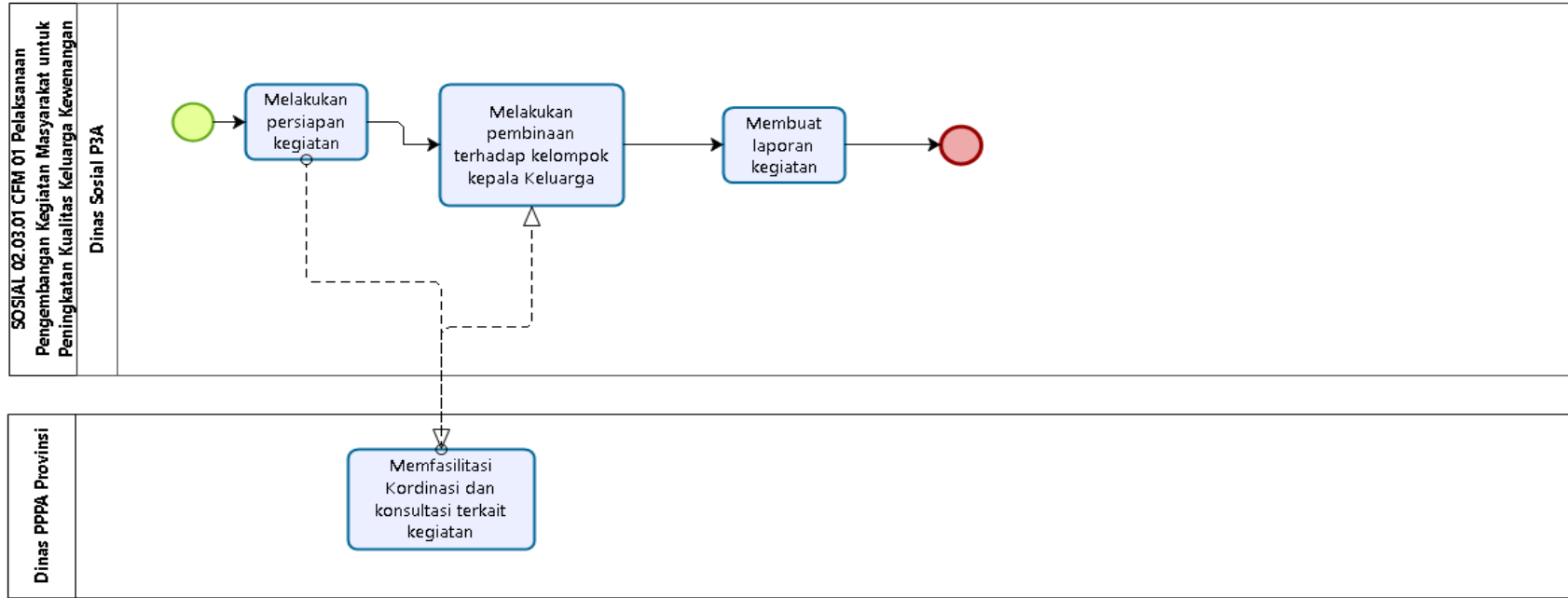


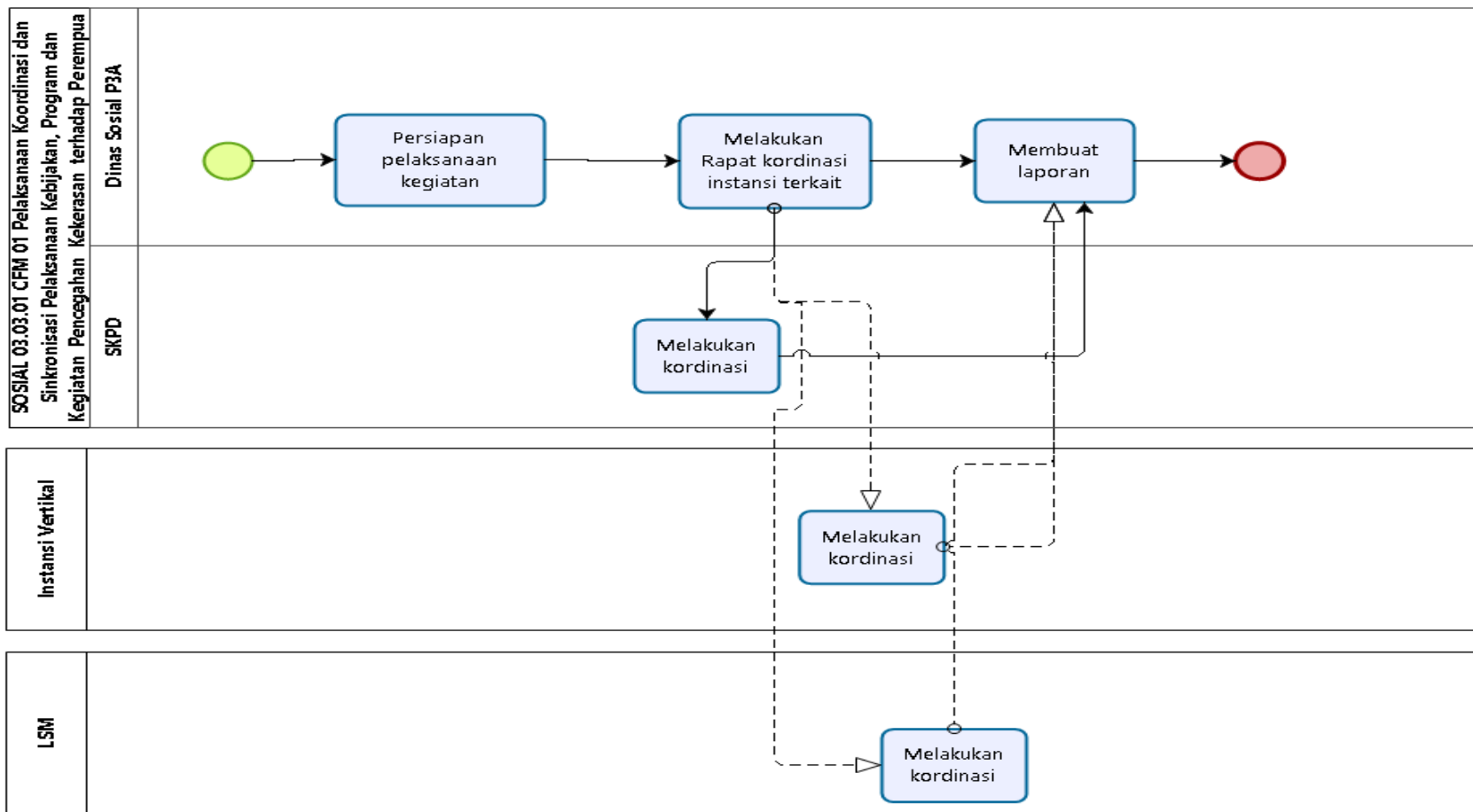


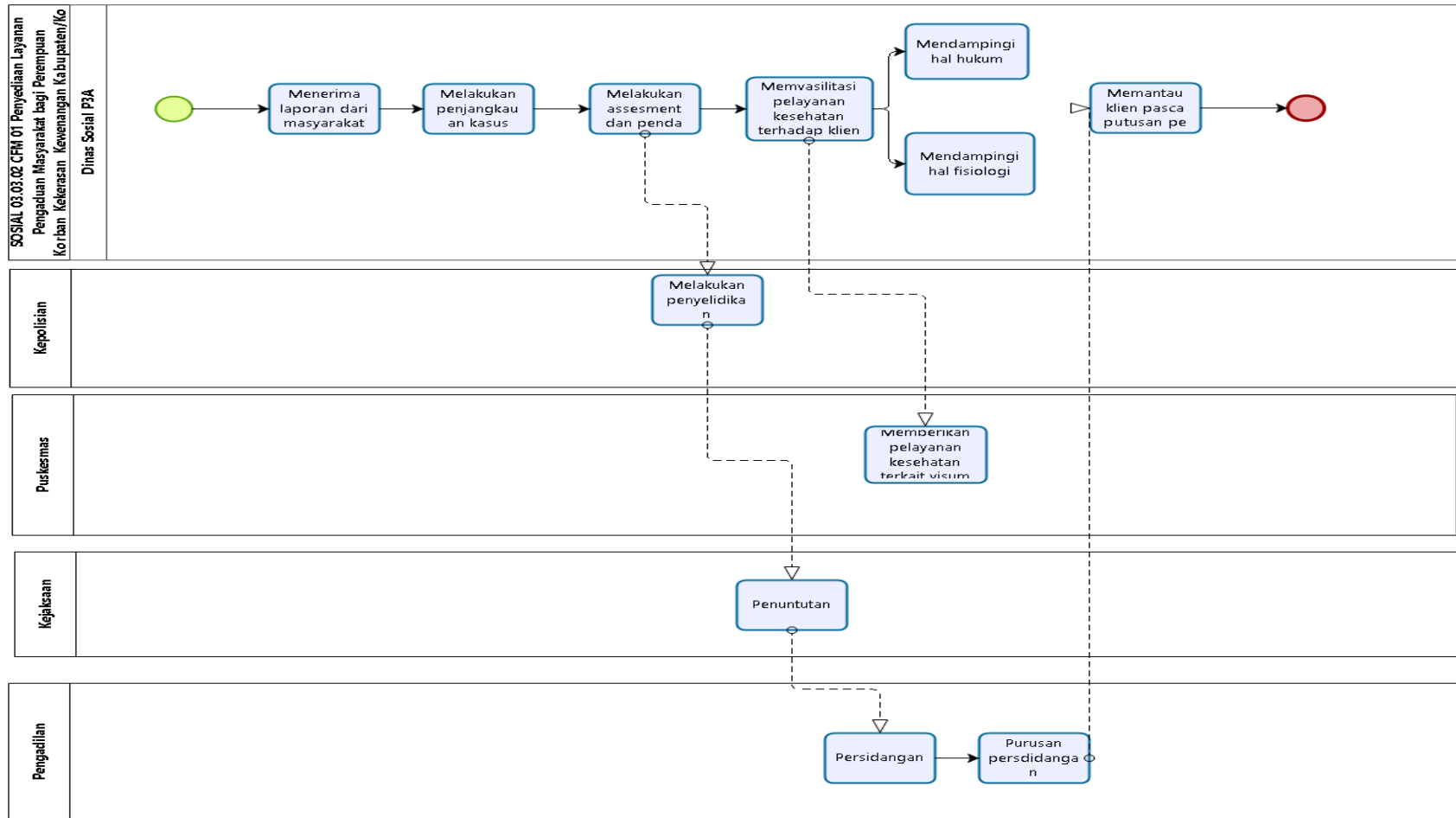




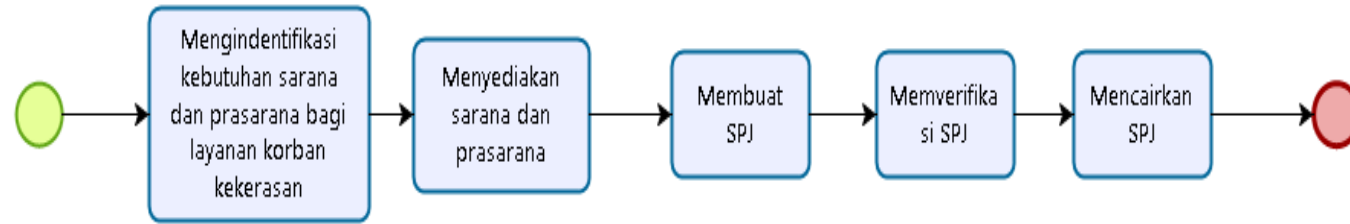


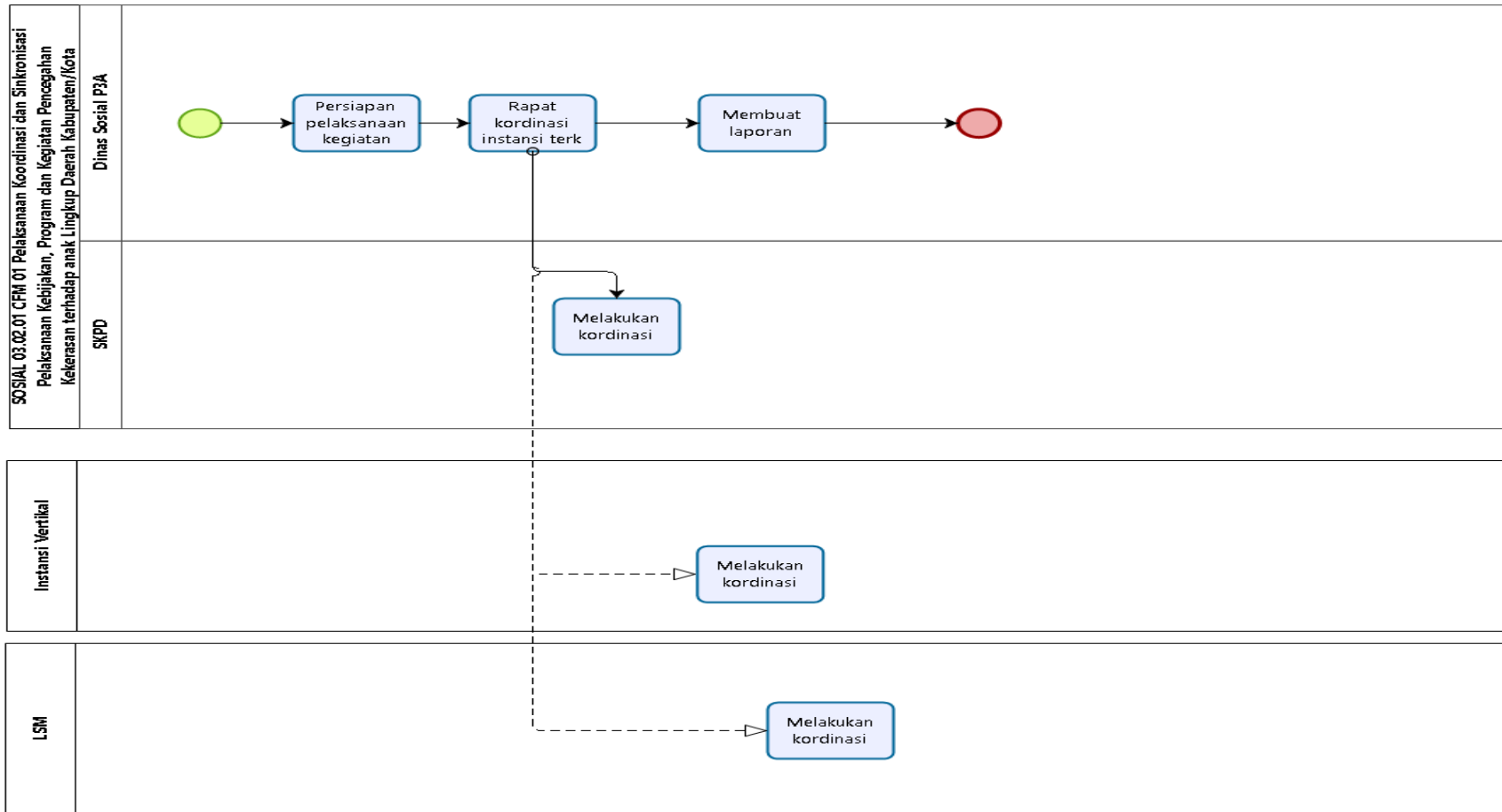


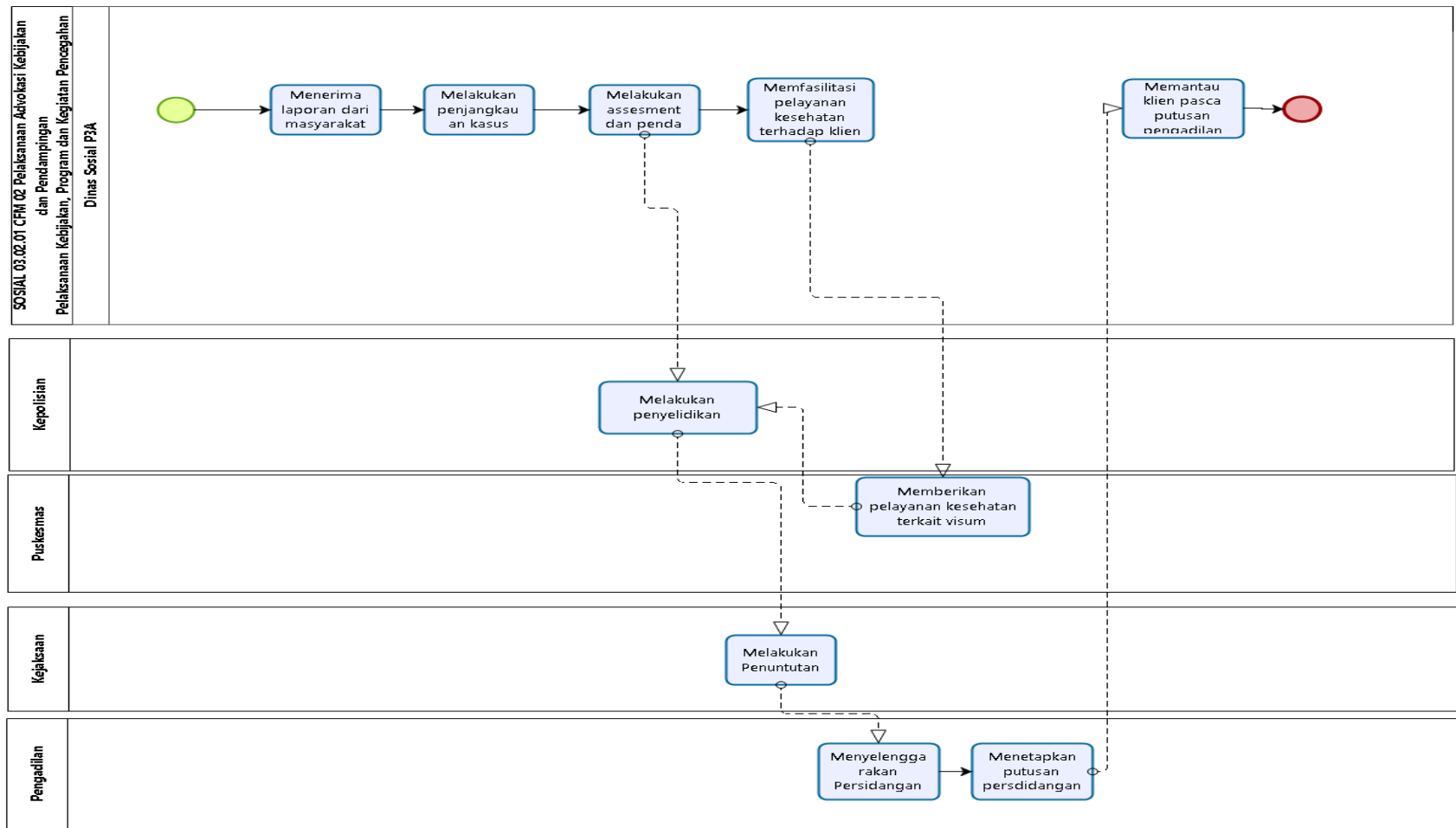


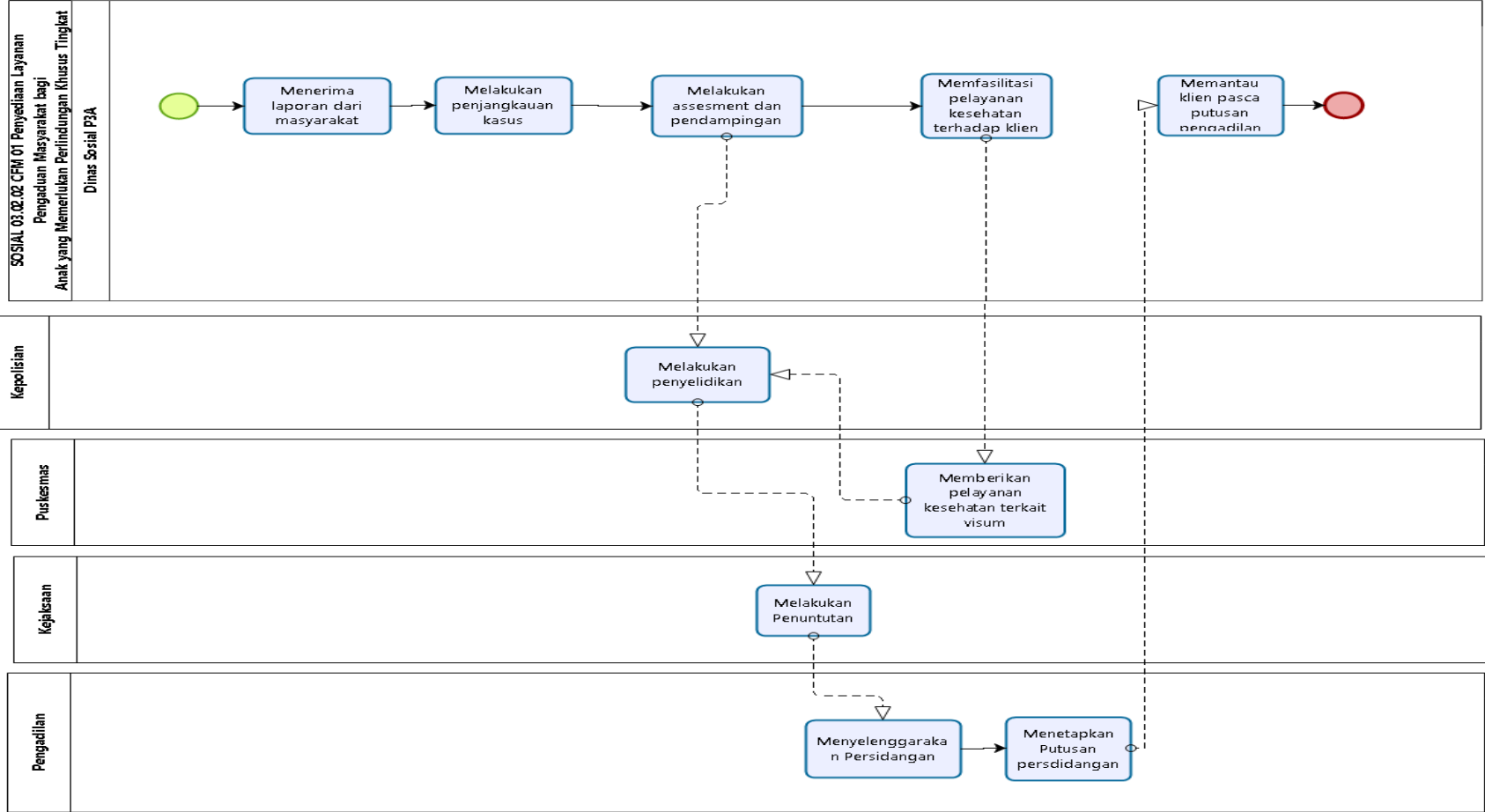


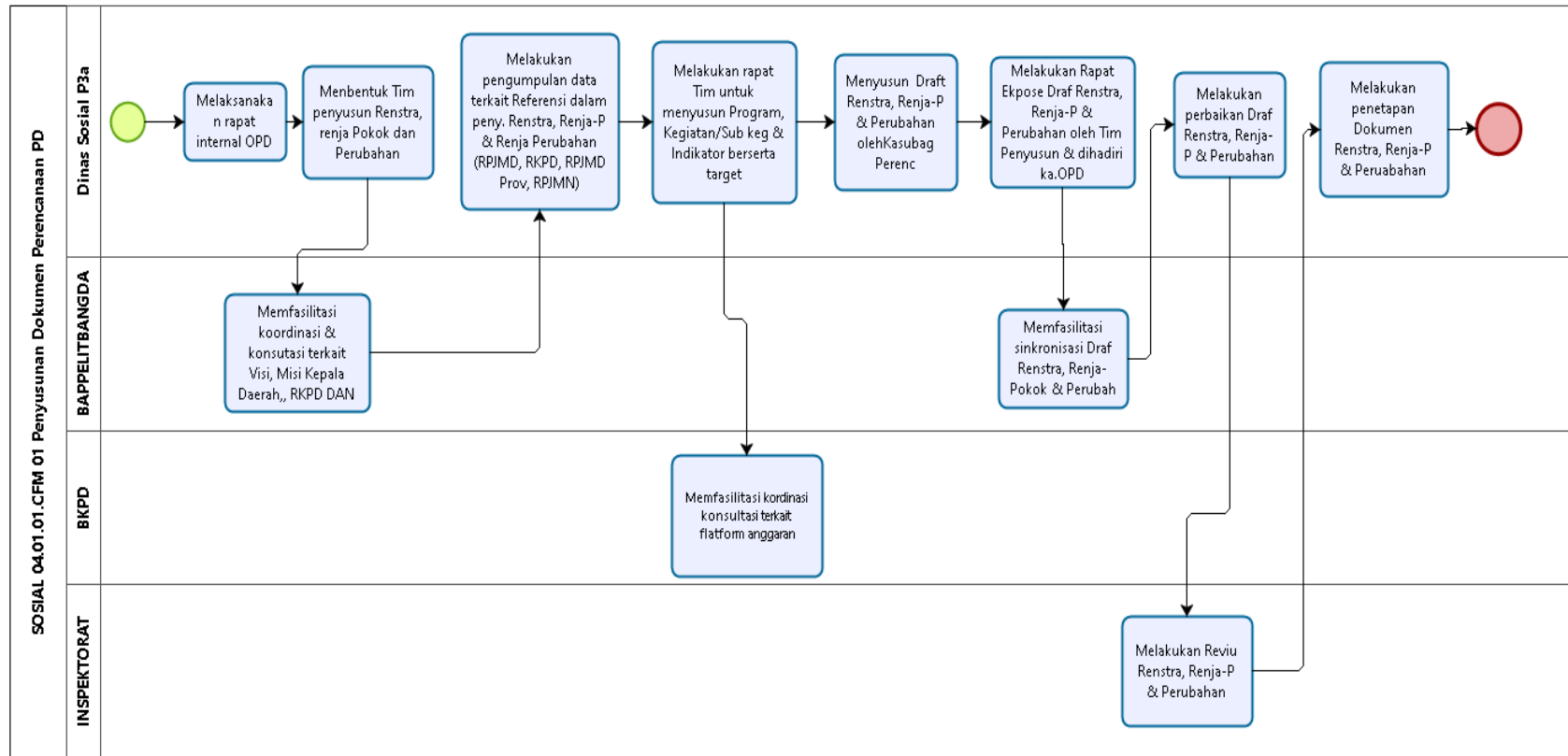
**SOSIAL 03.03.03 CFM 01 Pelaksanaan Advokasi
Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana
Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekera
Dinas Sosial P3A**

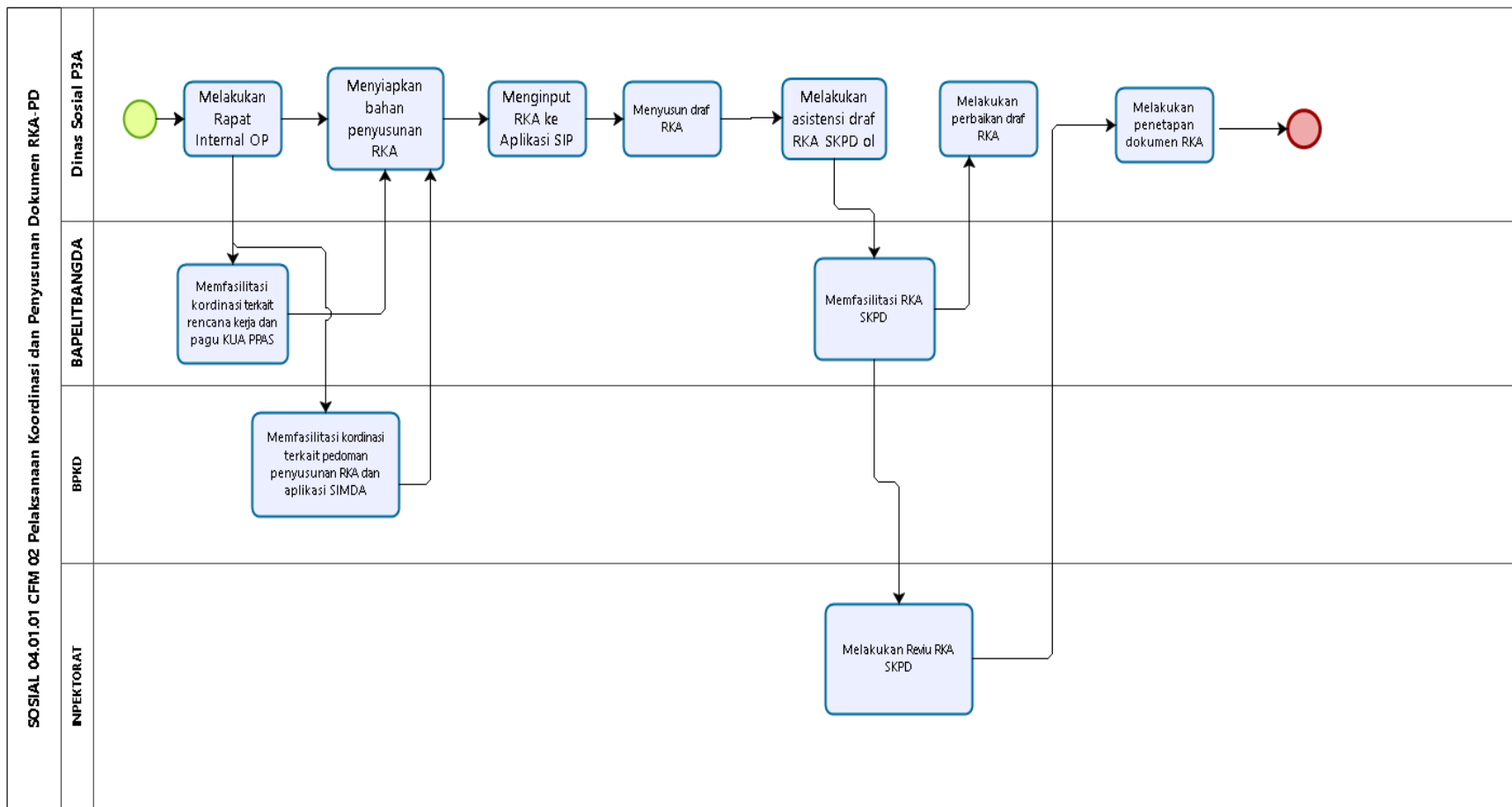


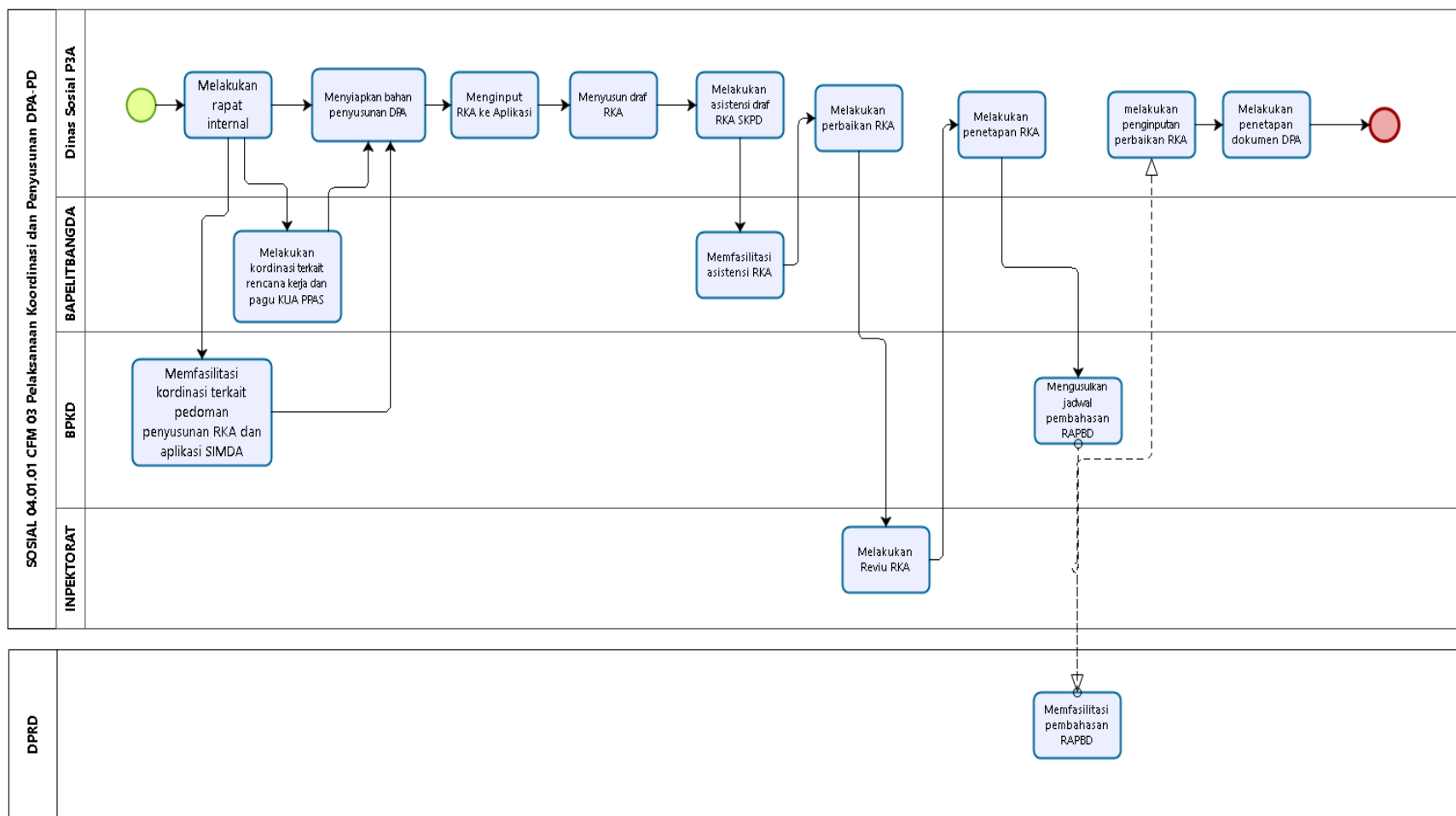


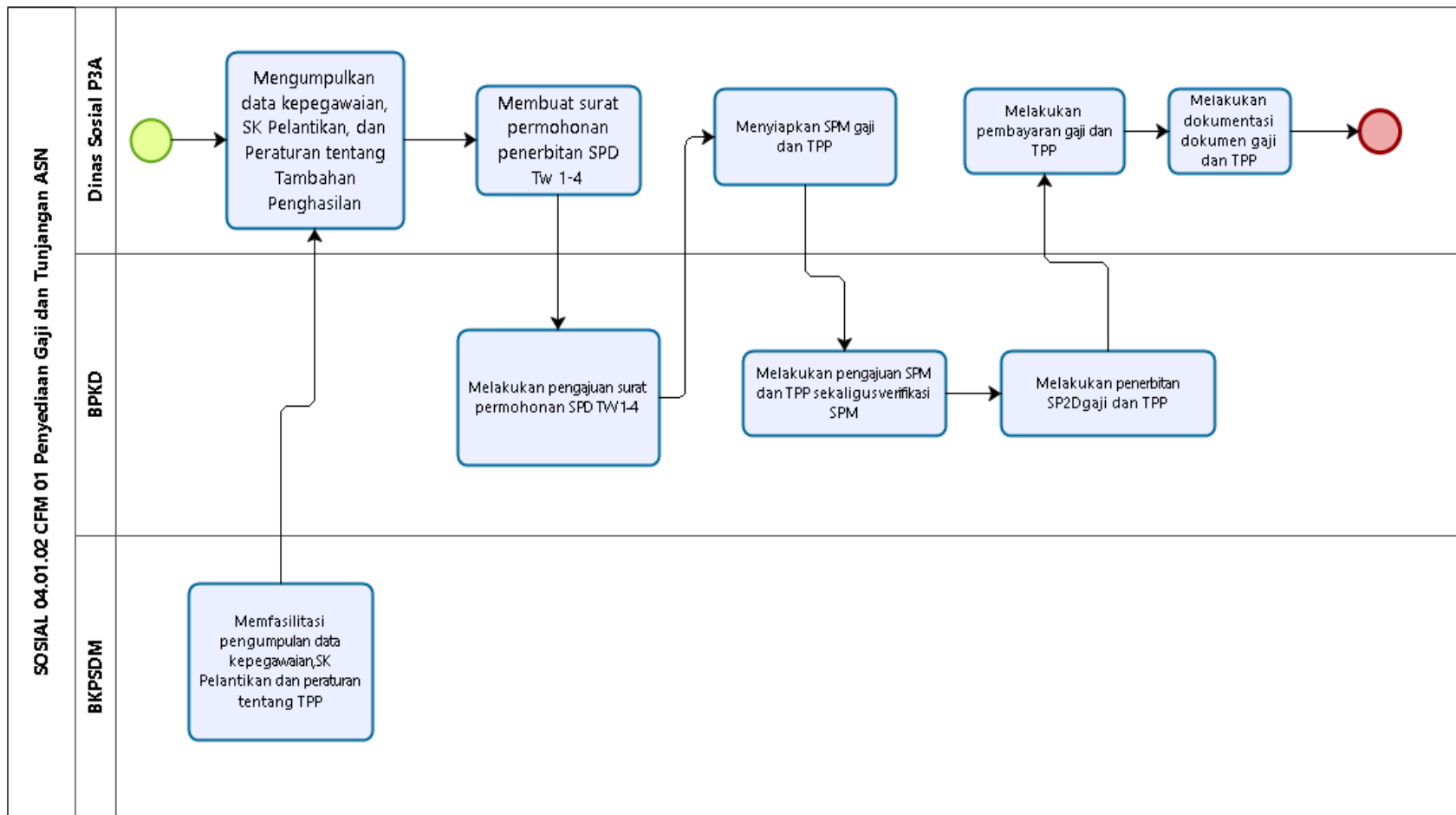


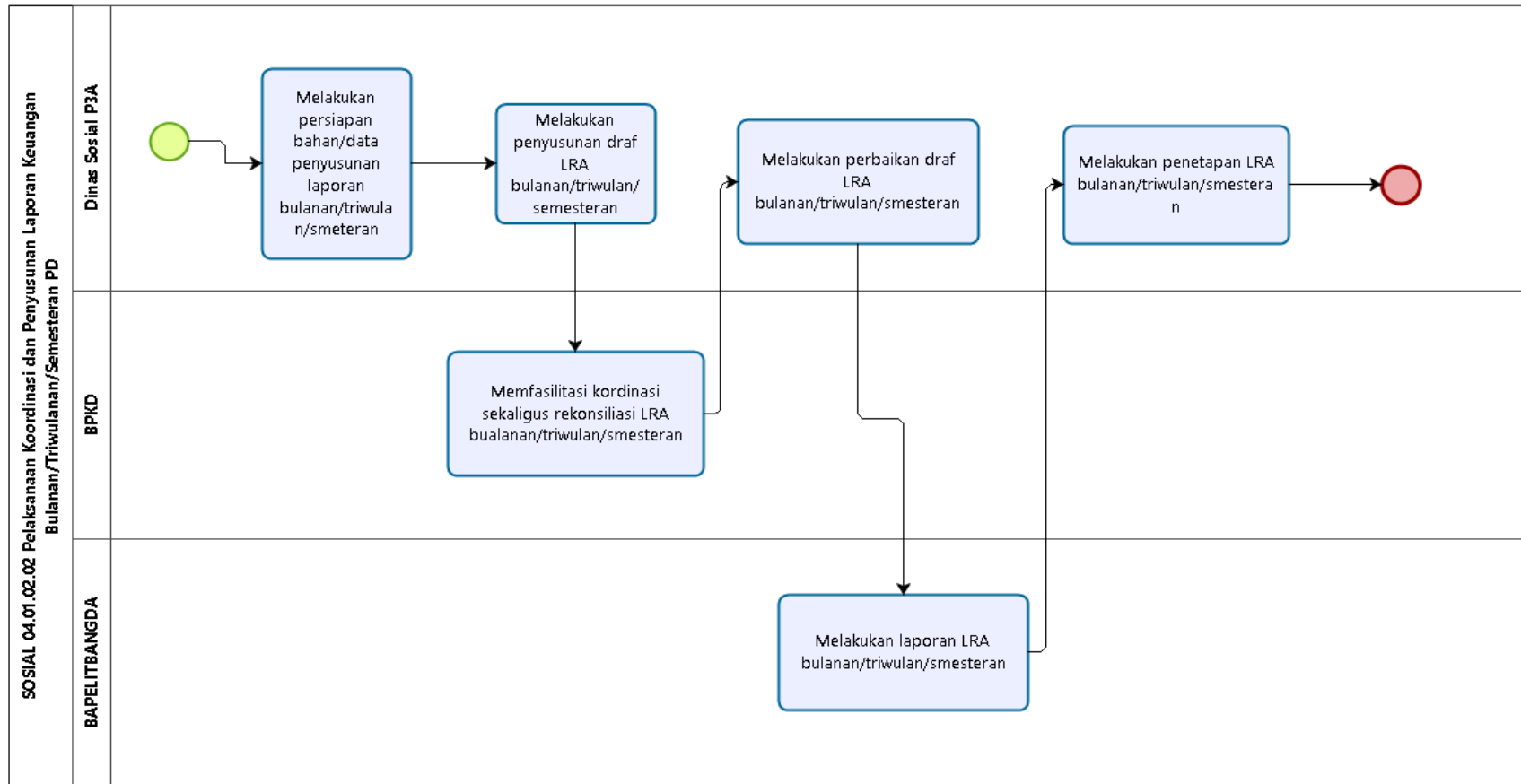


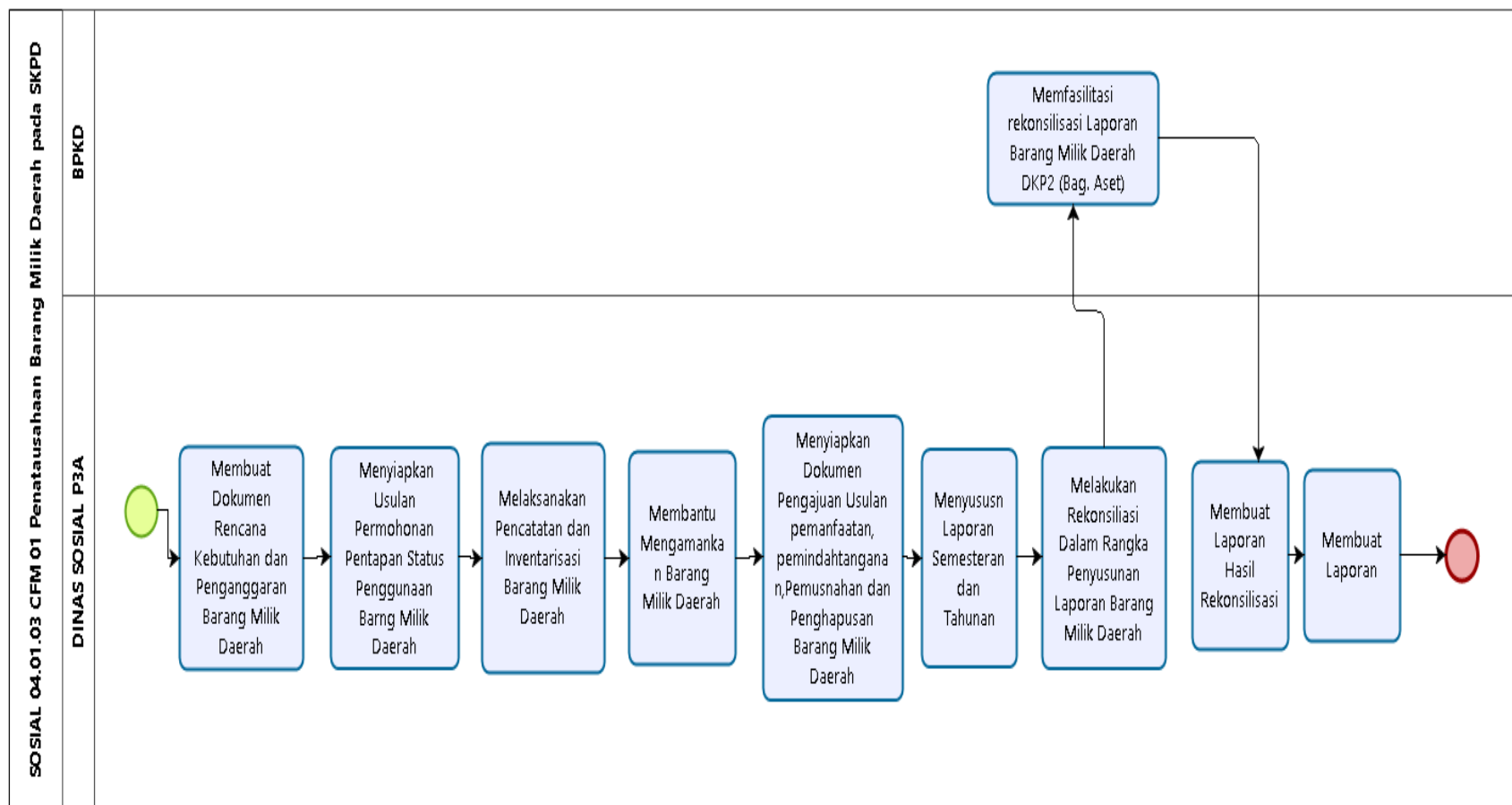


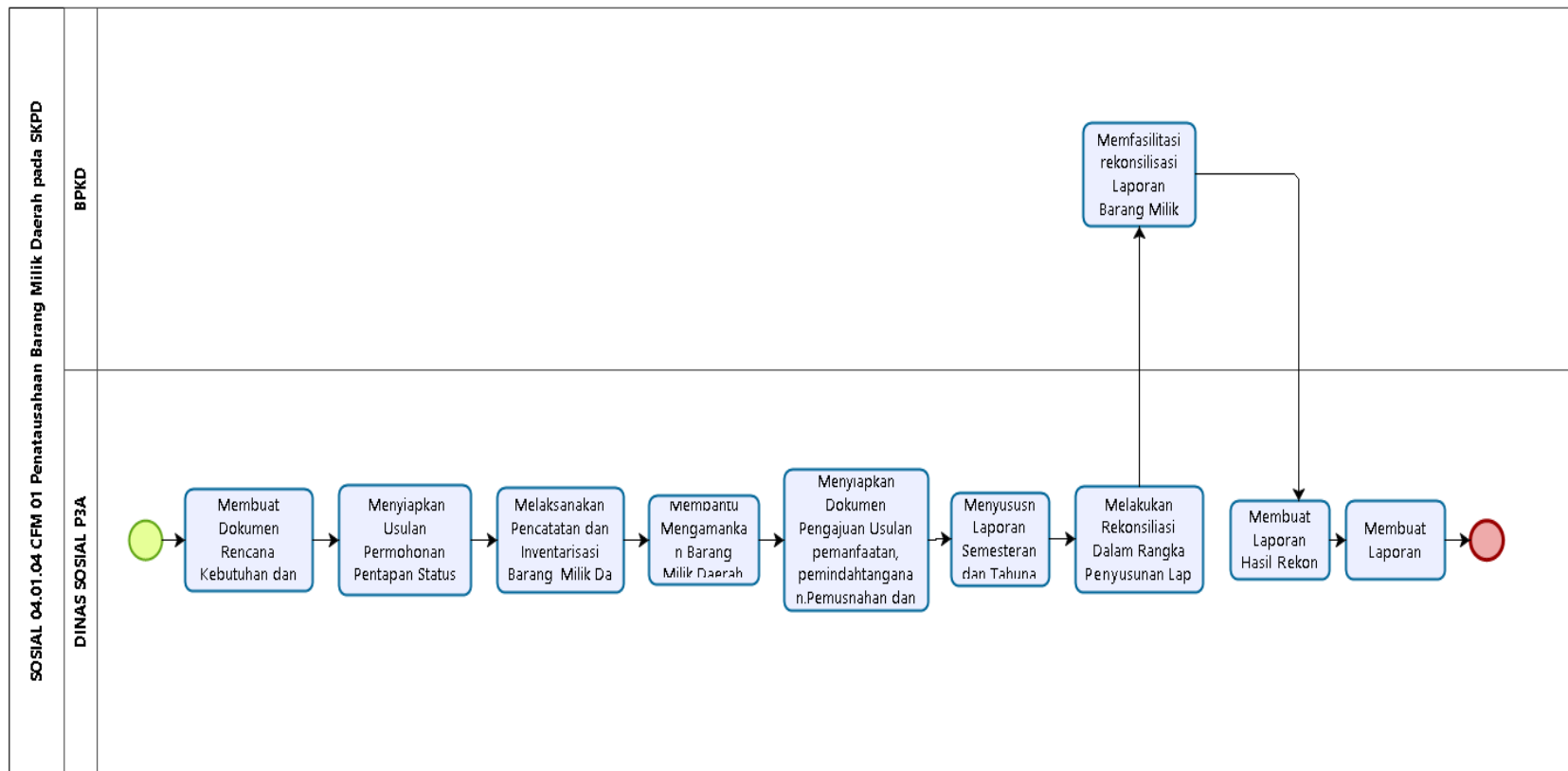


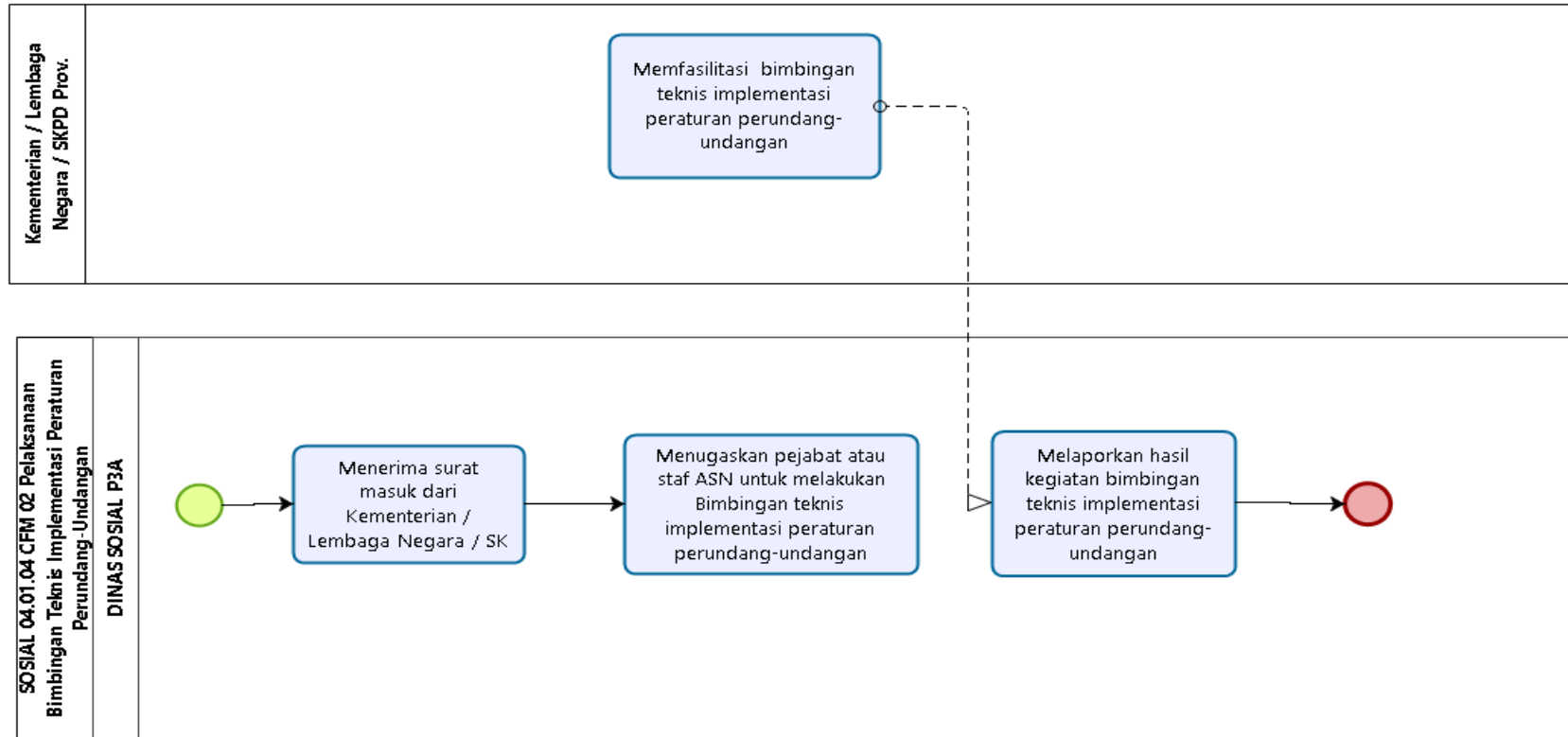


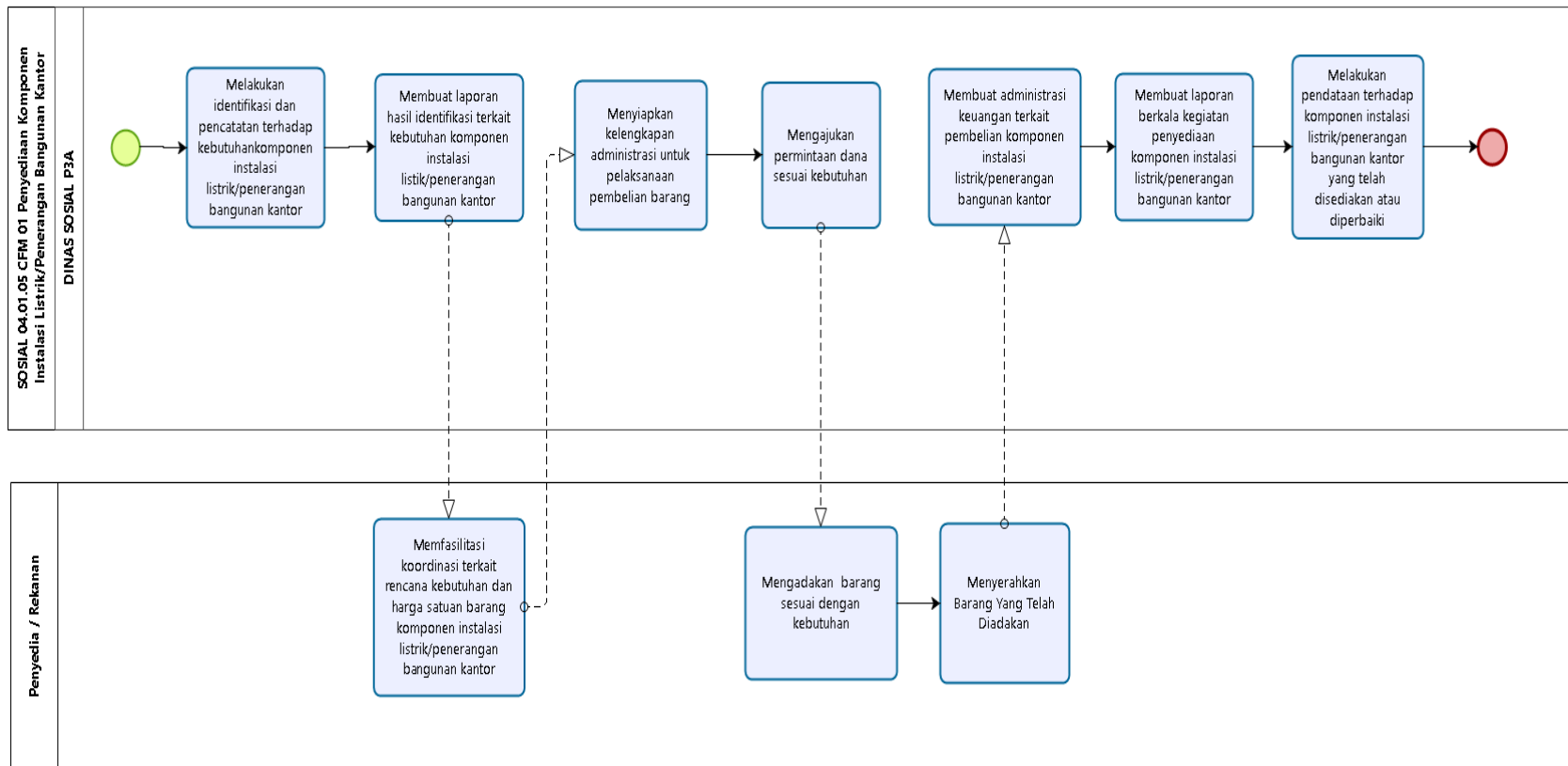


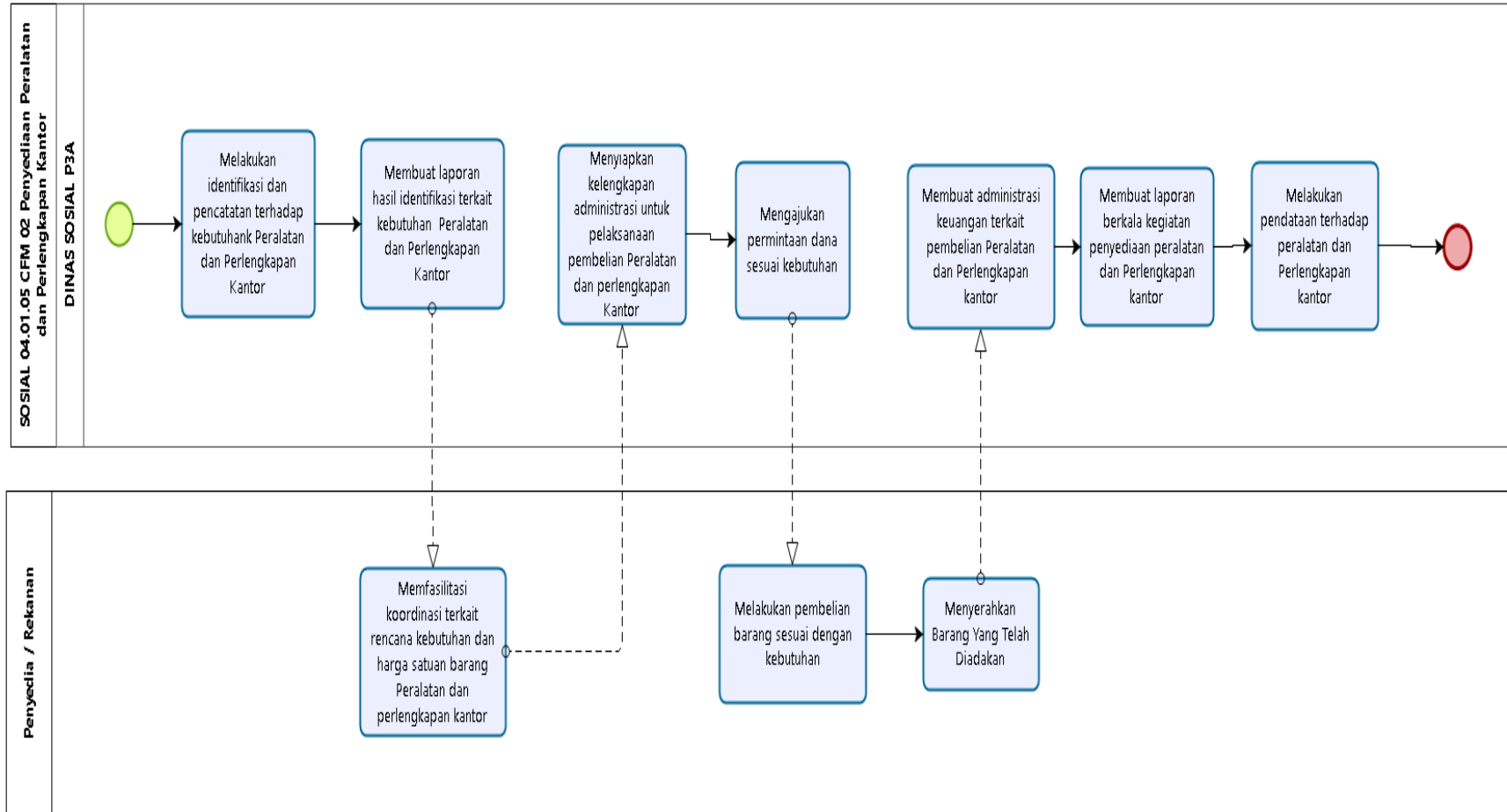


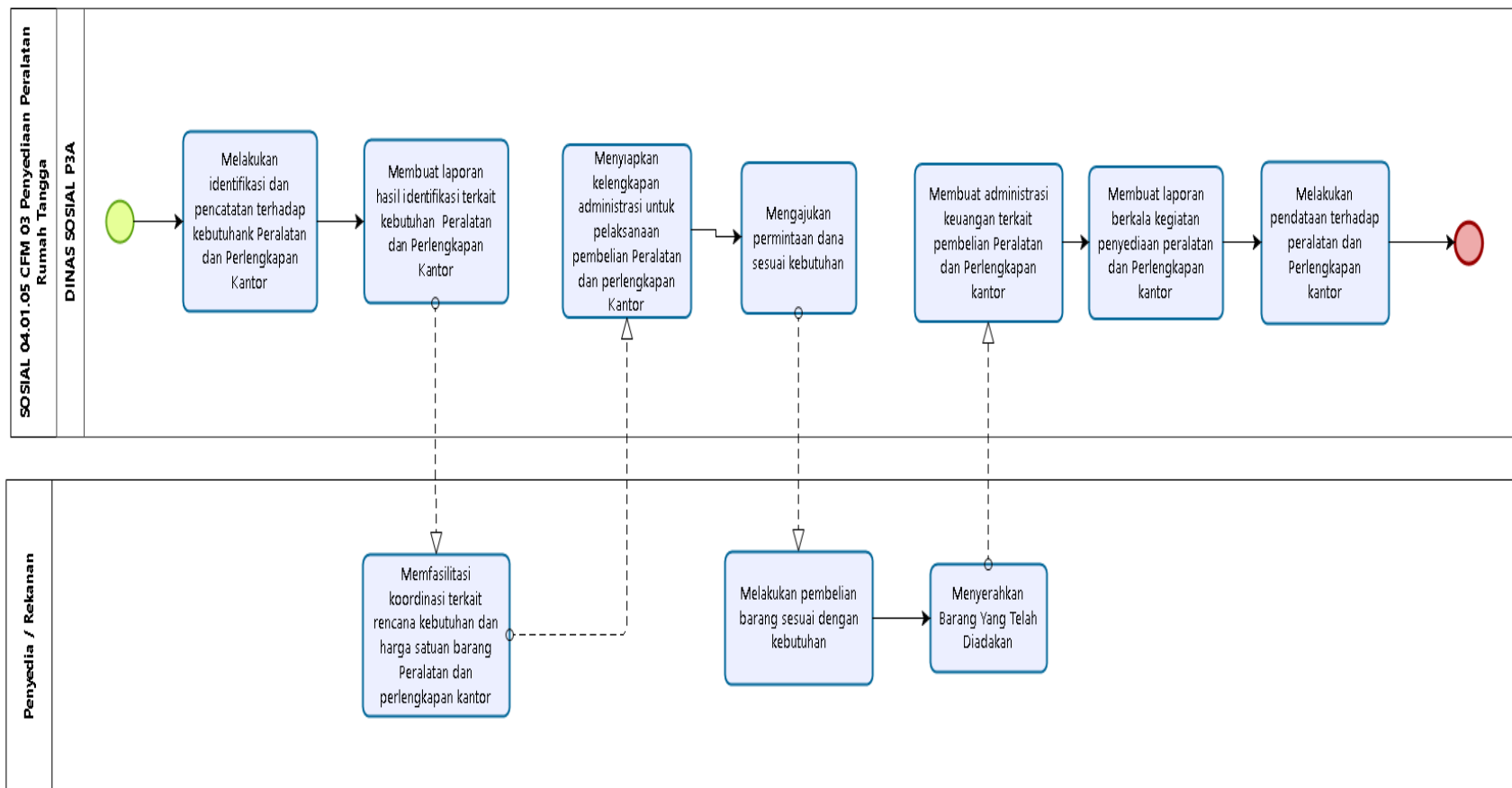


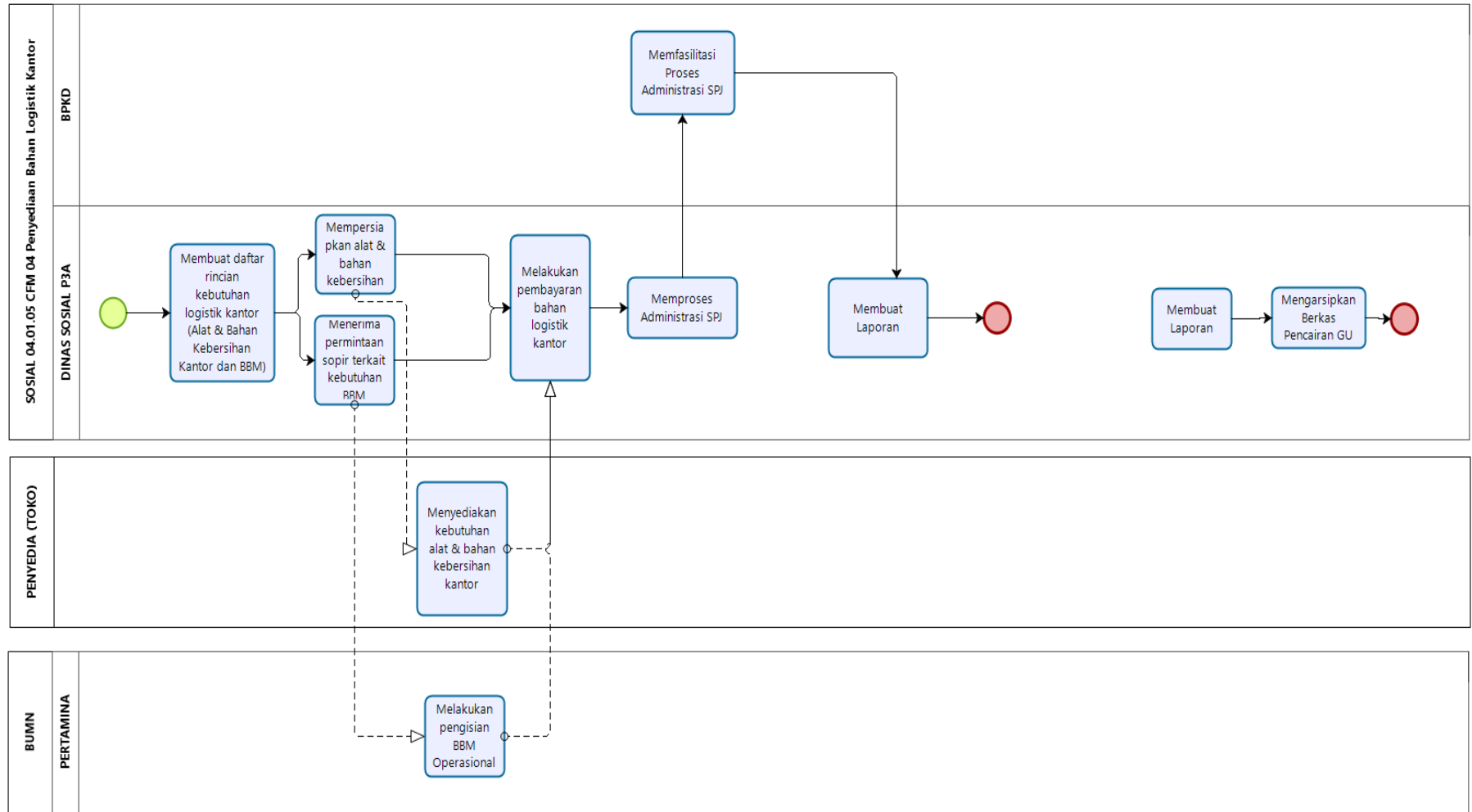


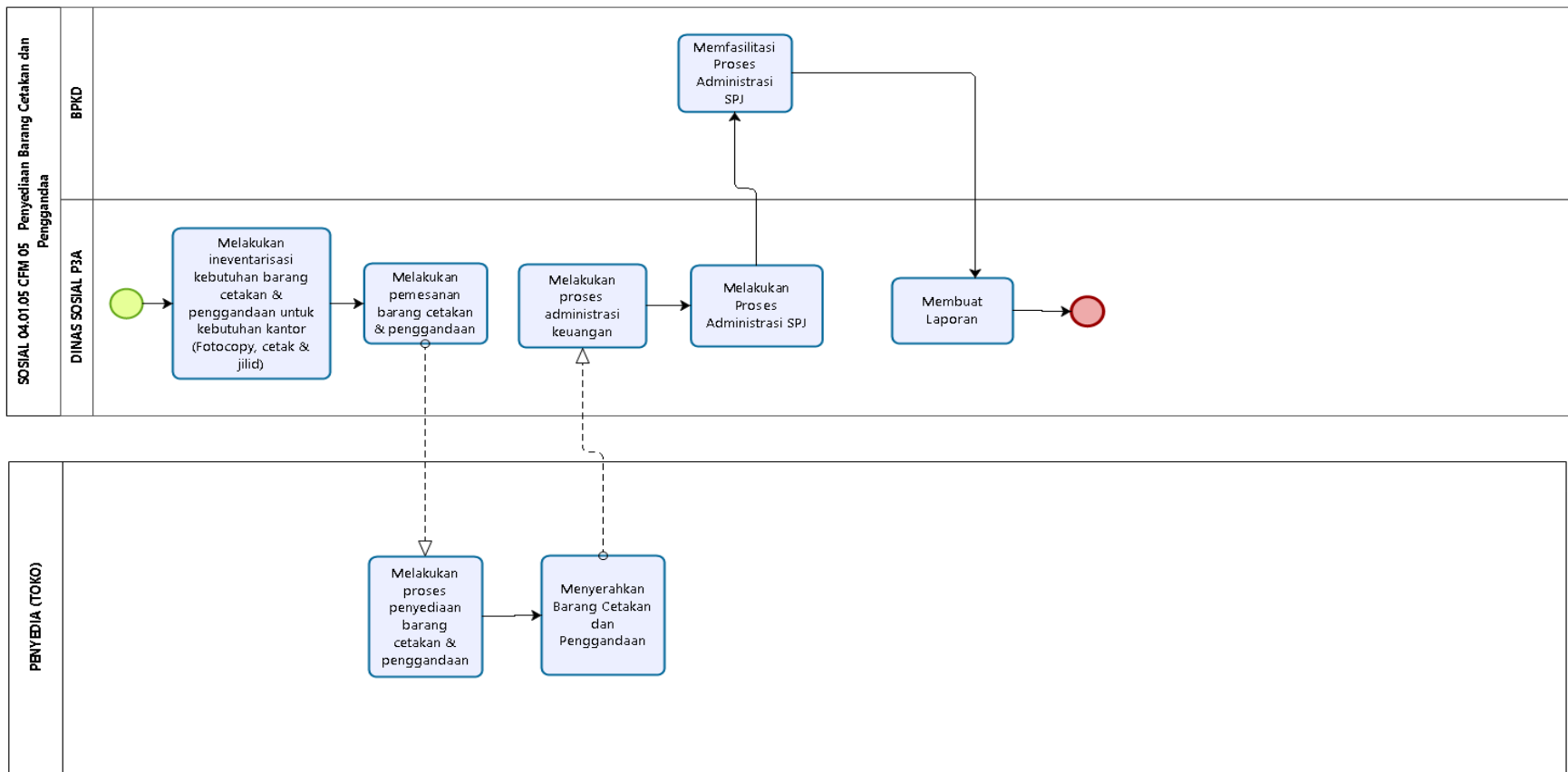


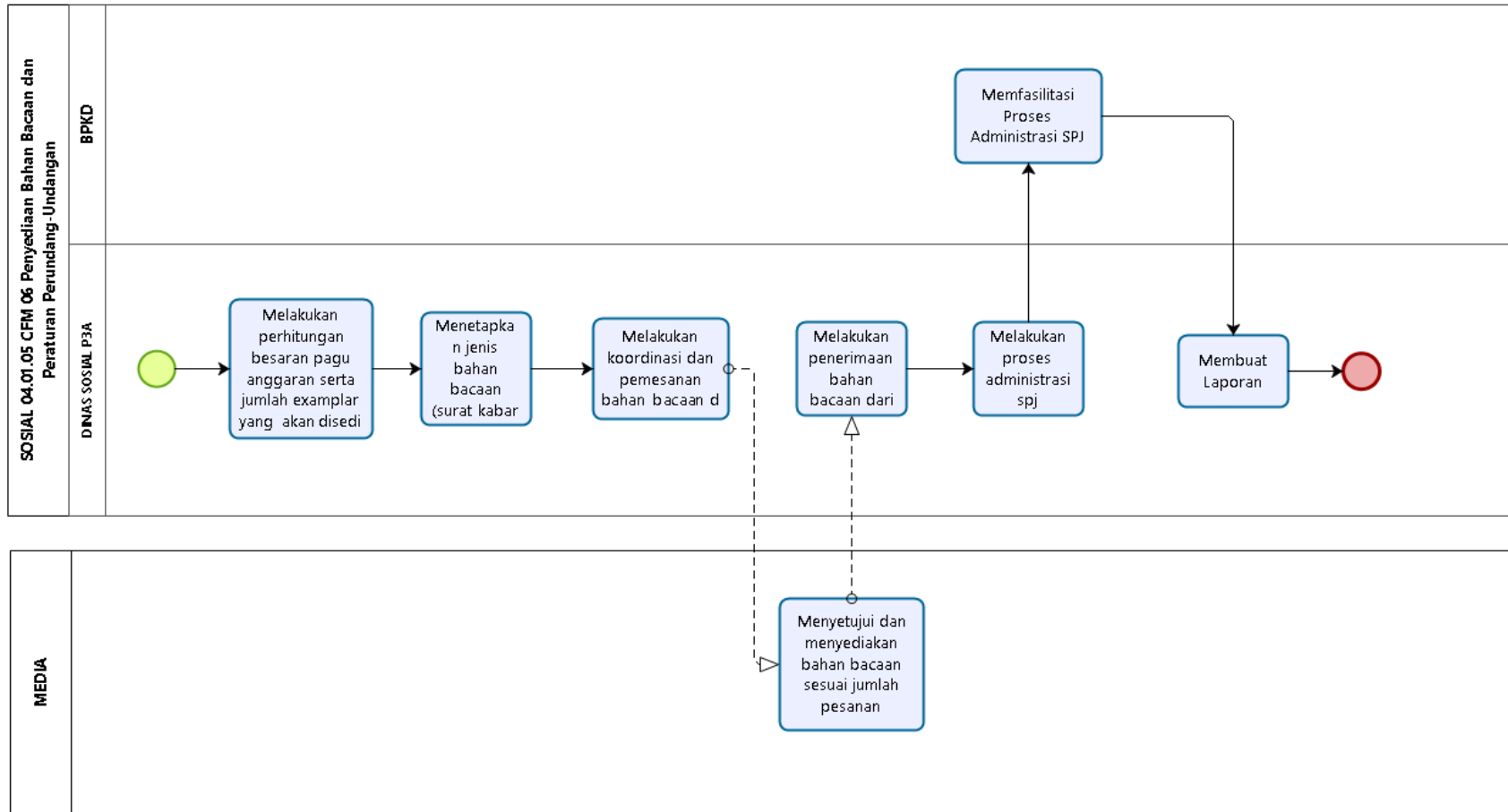


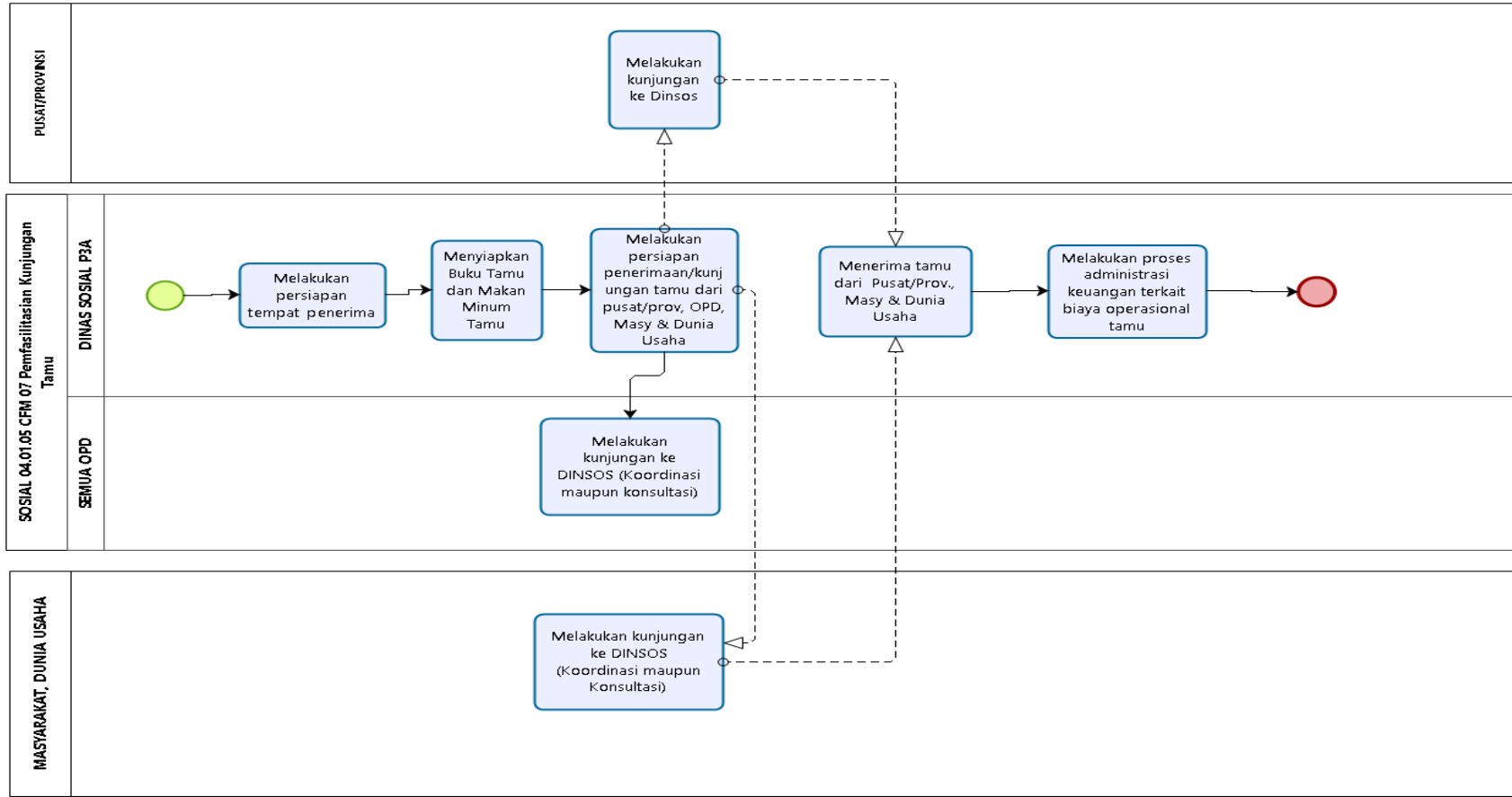


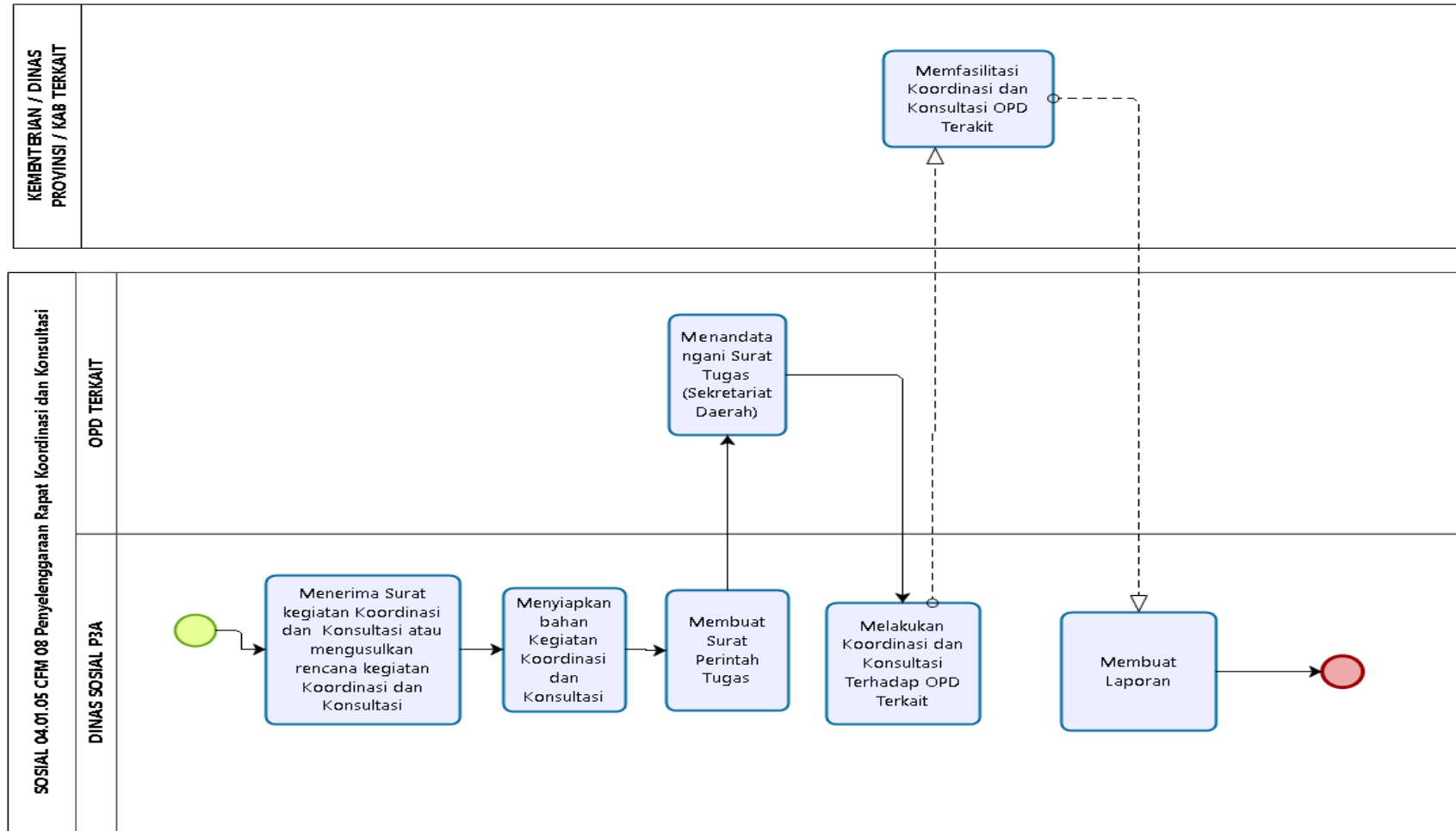


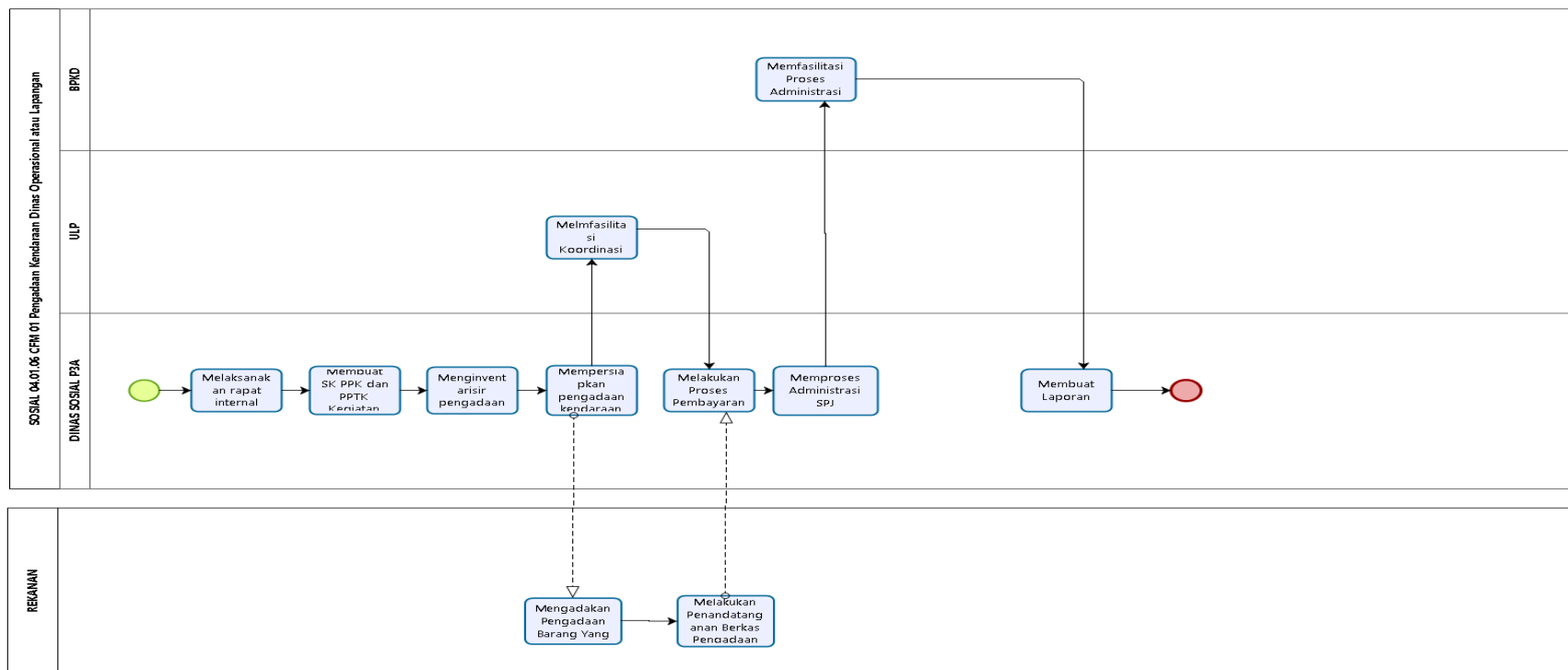


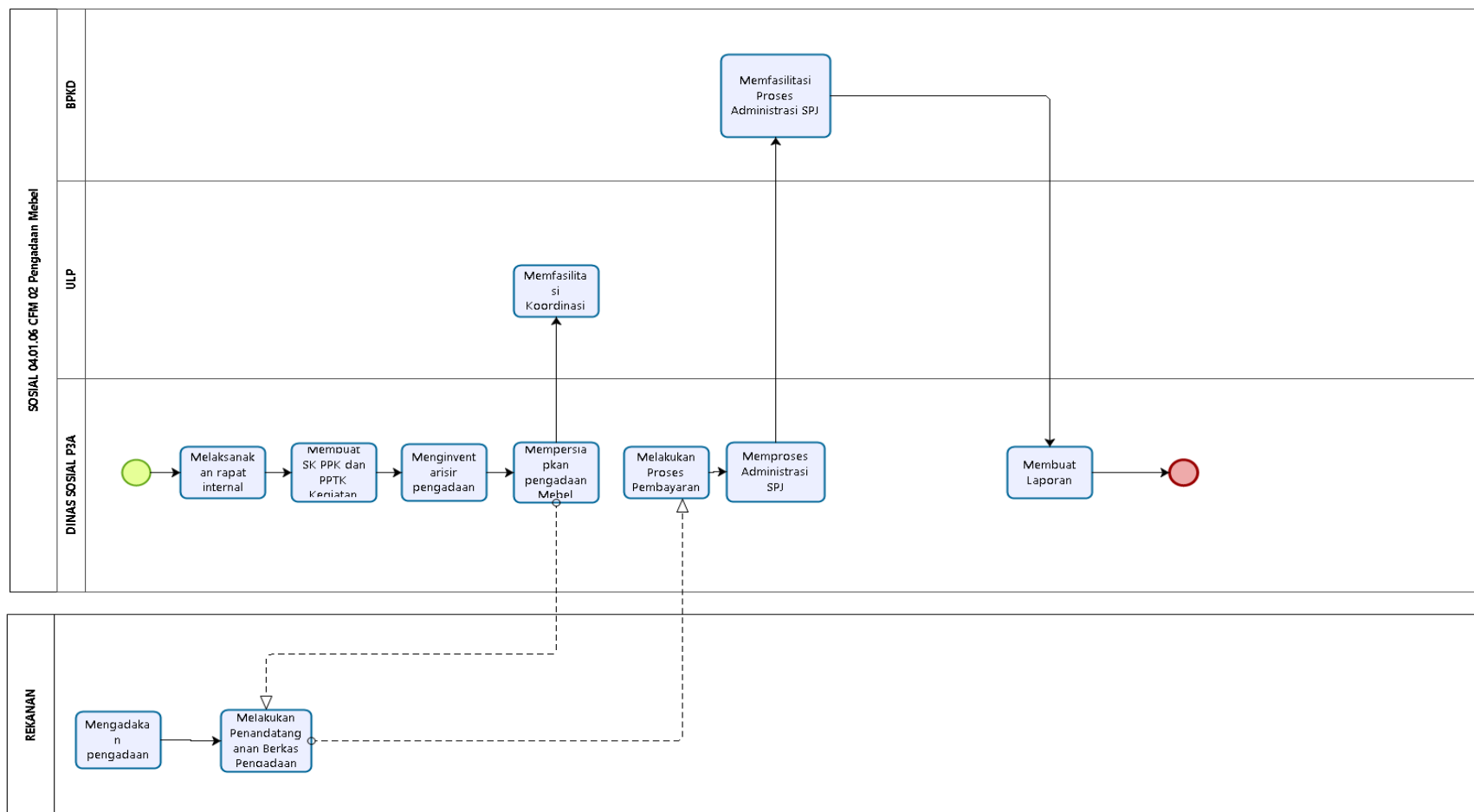


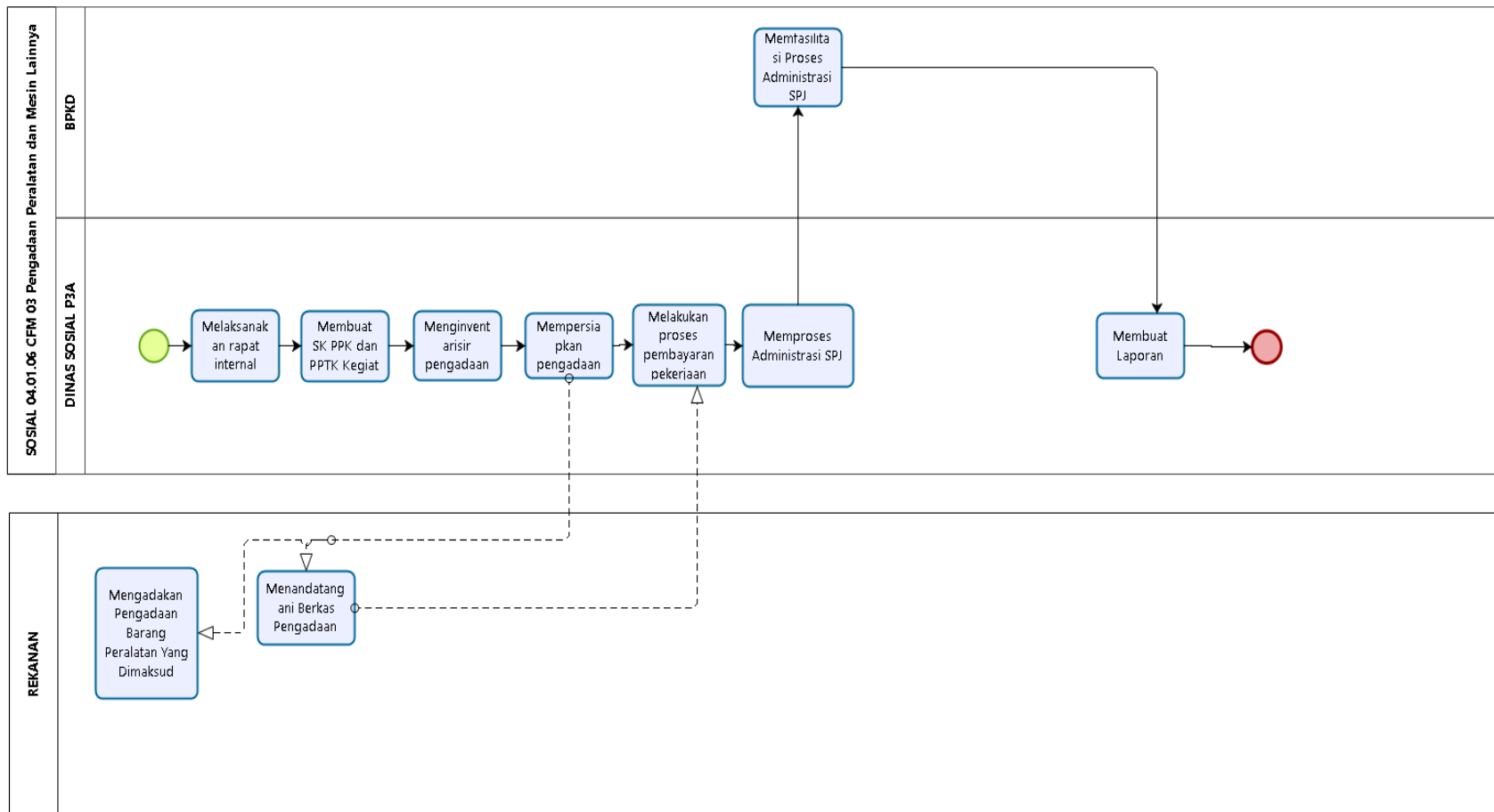


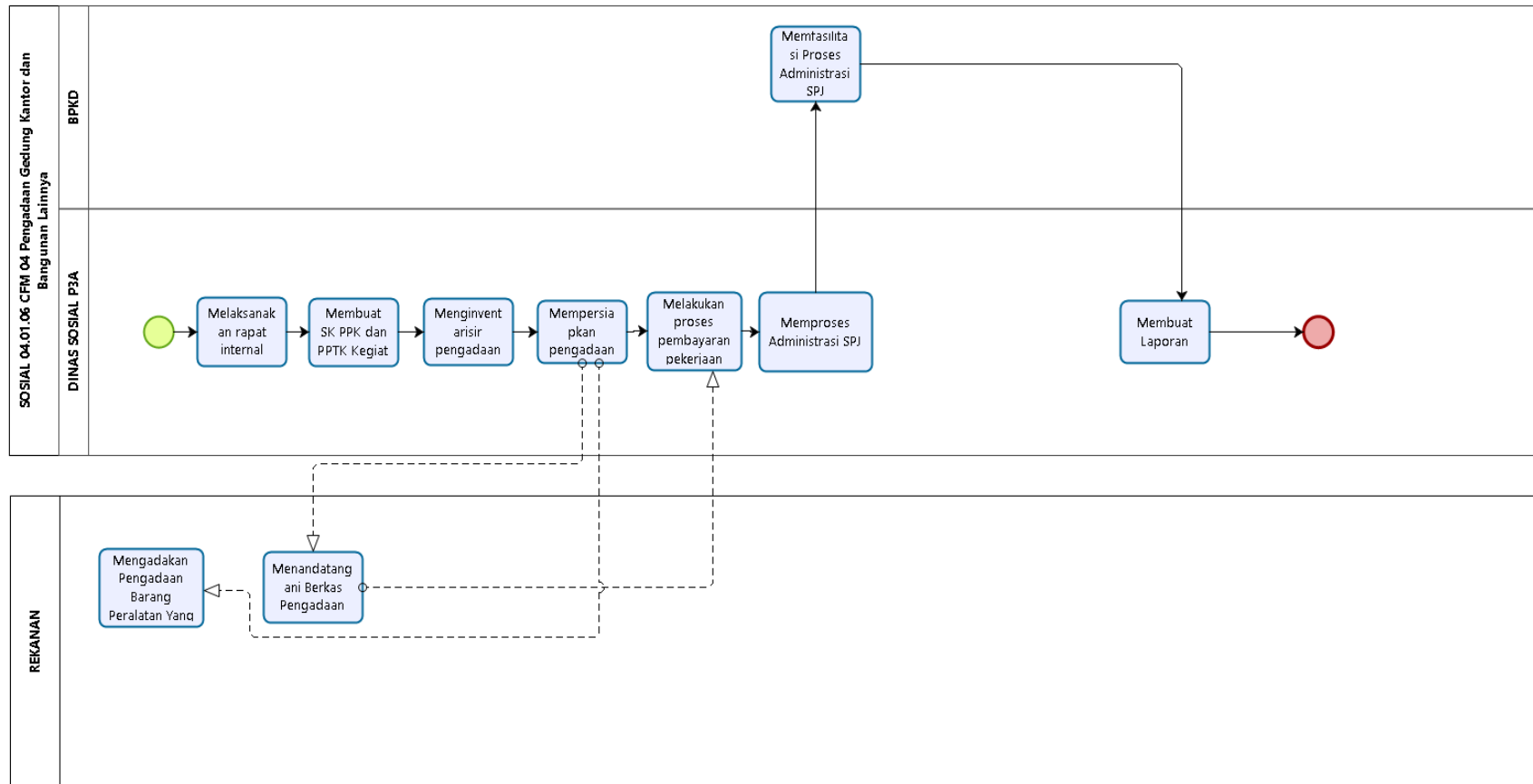


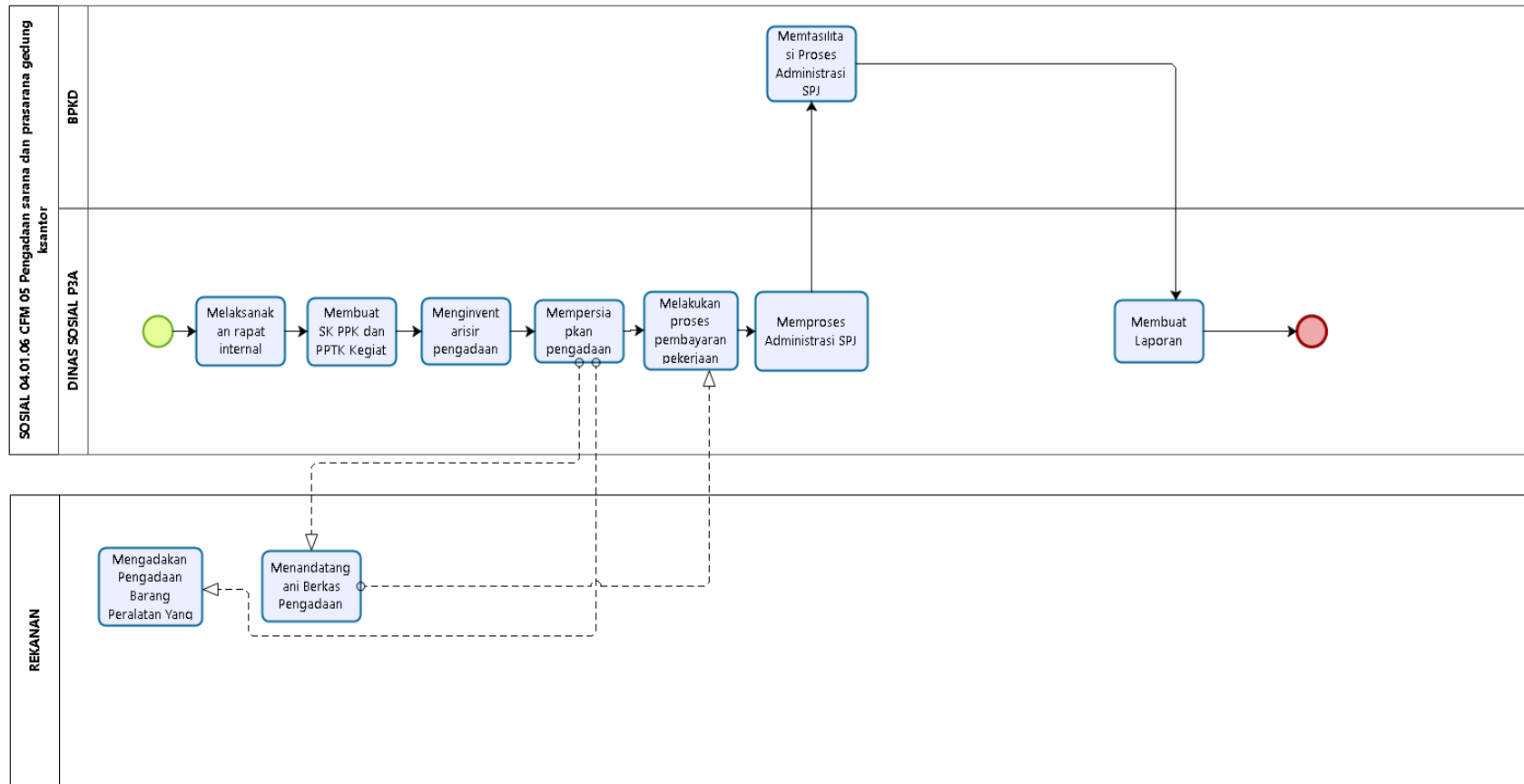


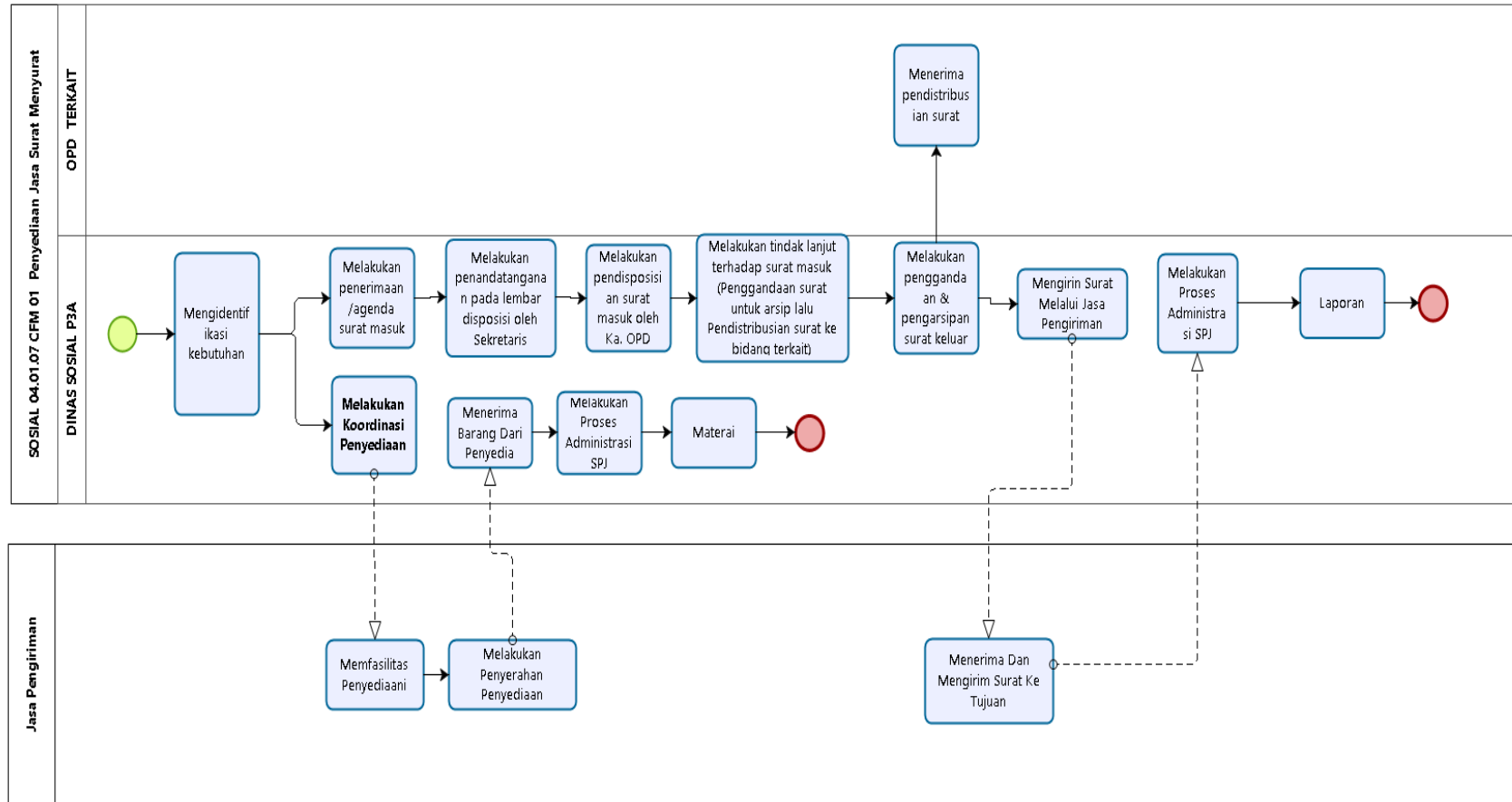


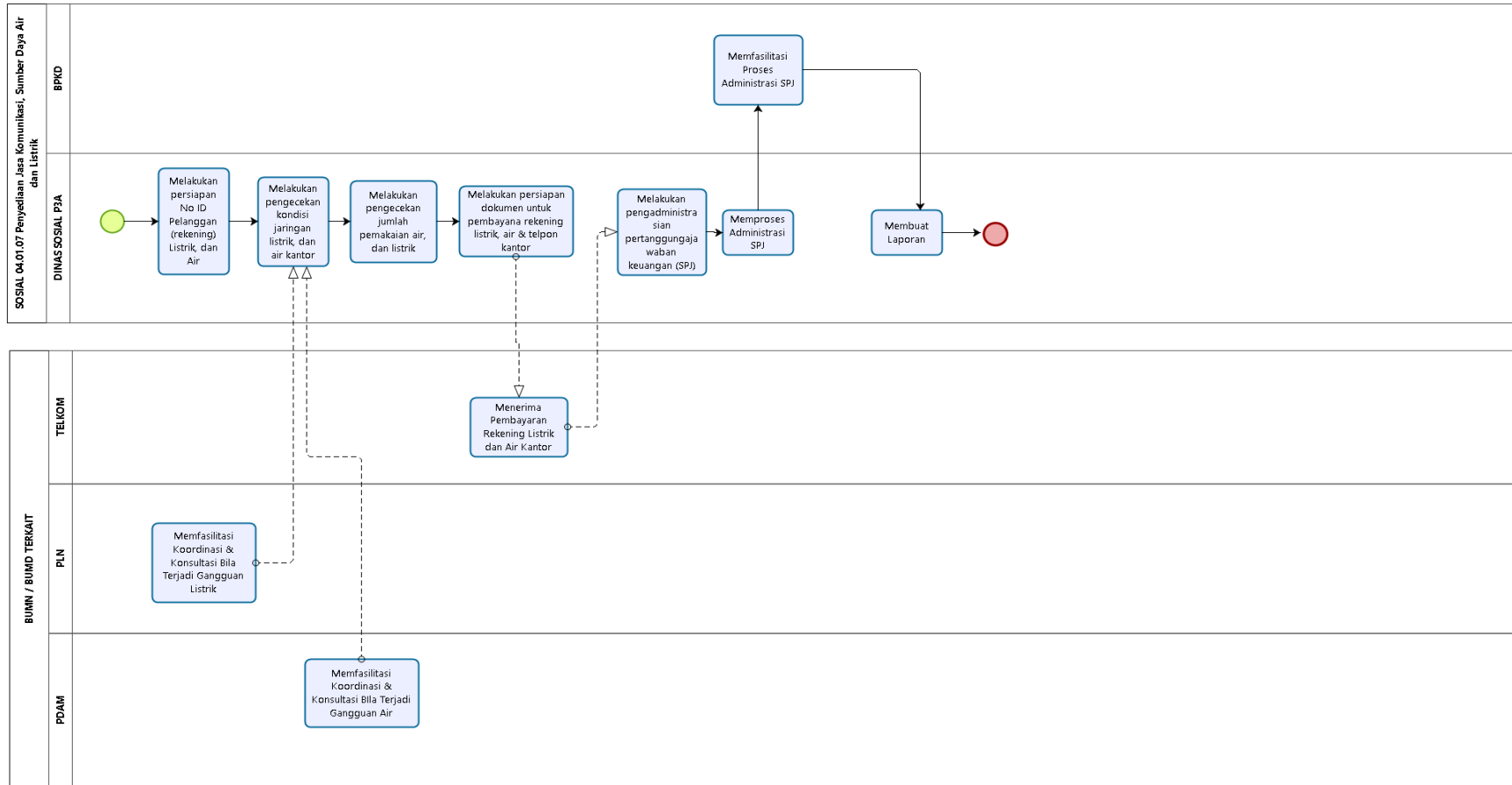


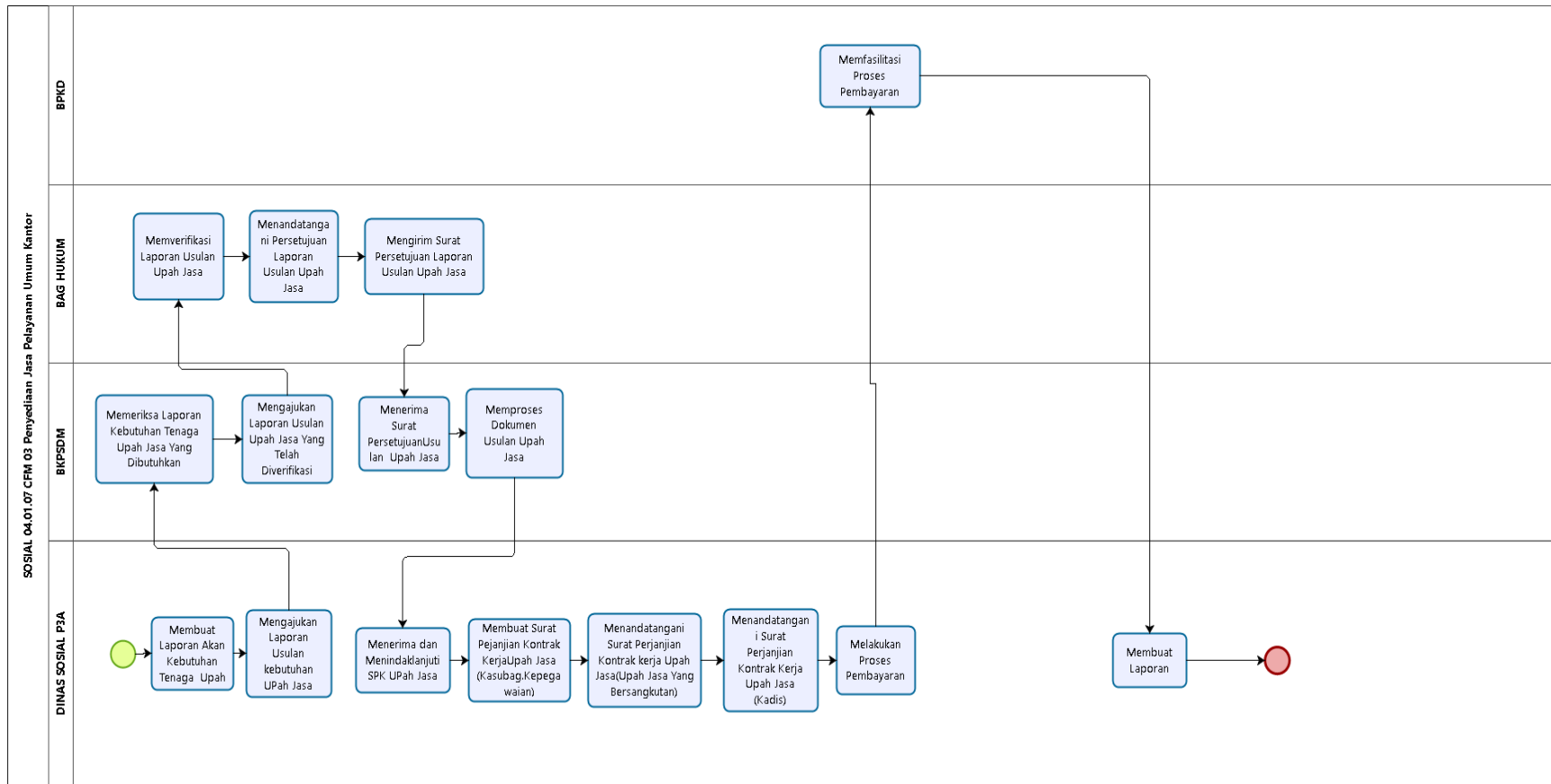


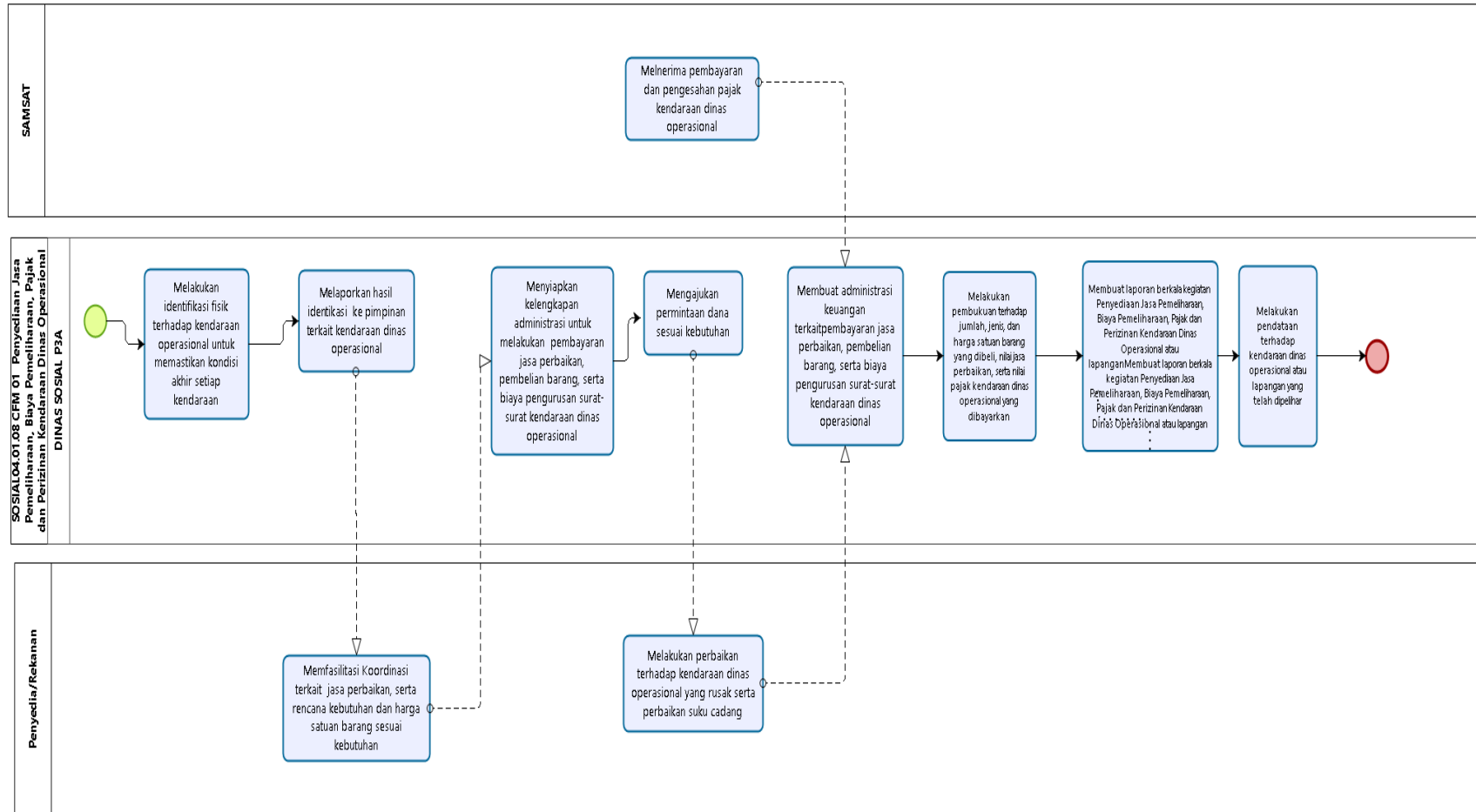


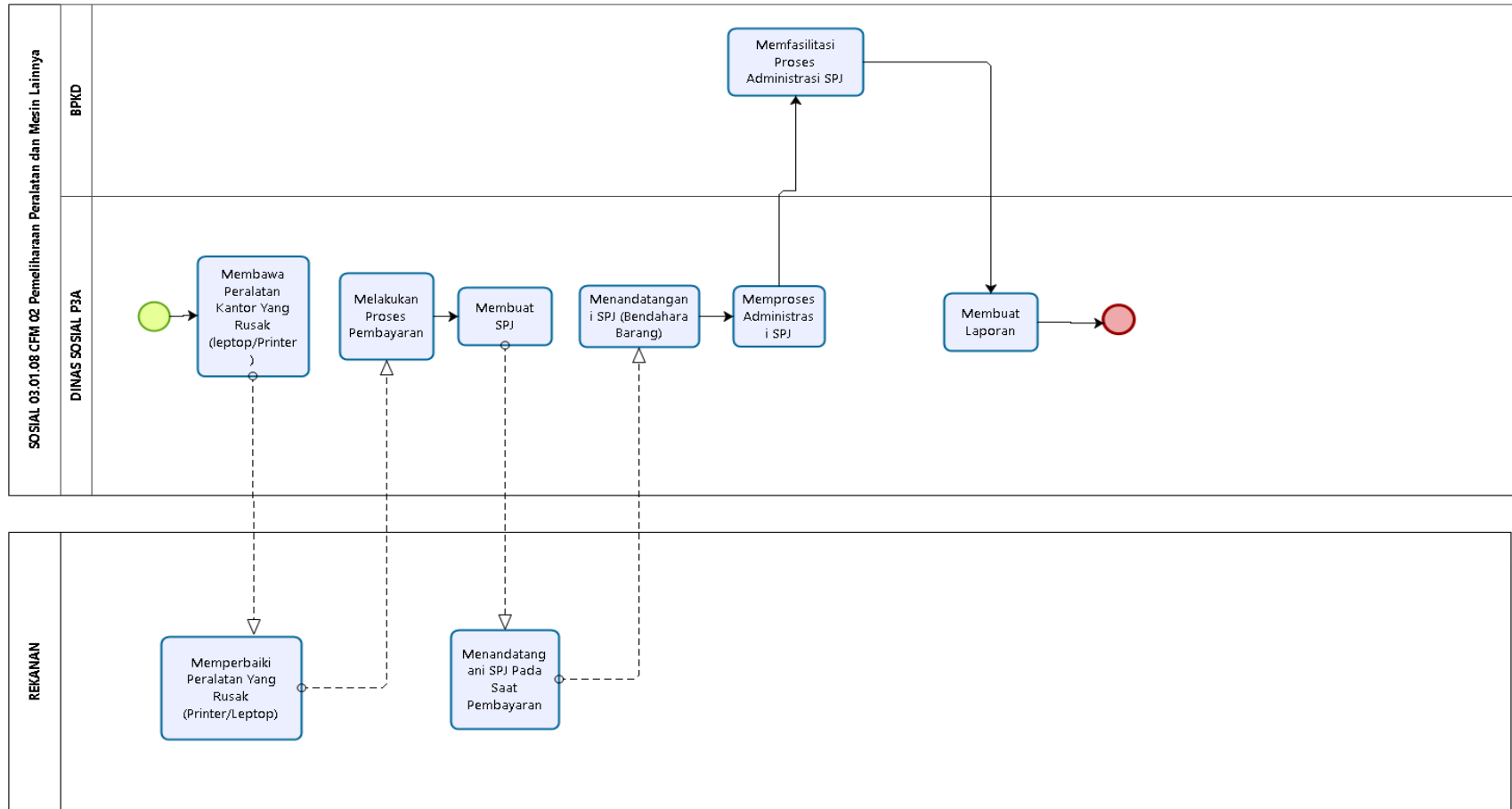


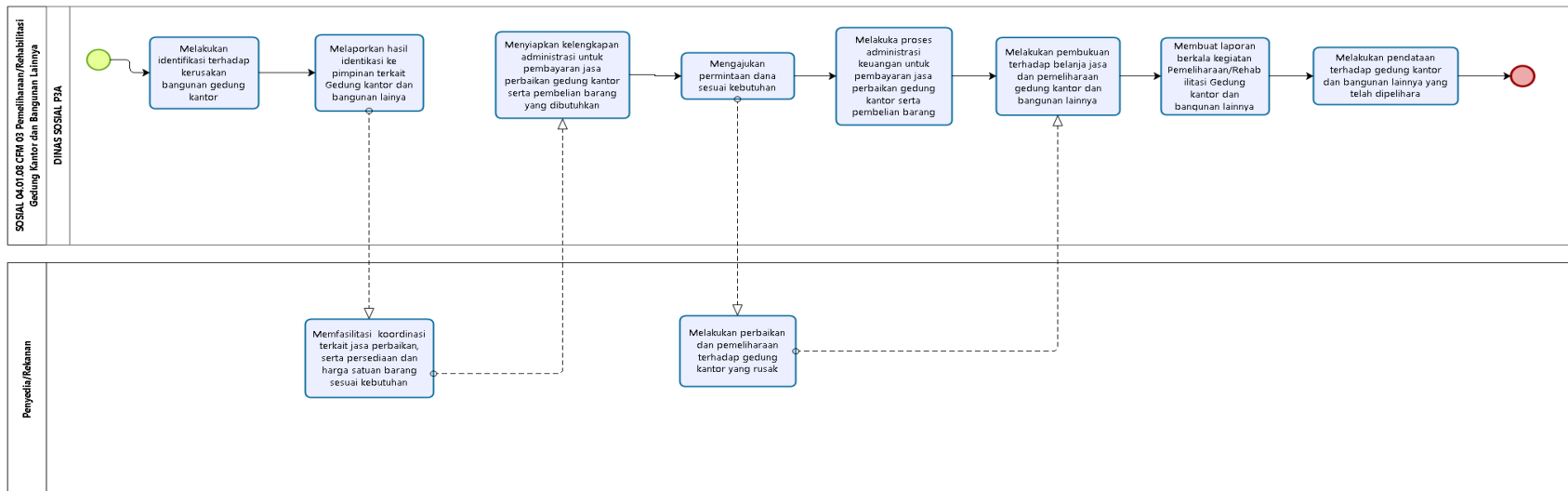






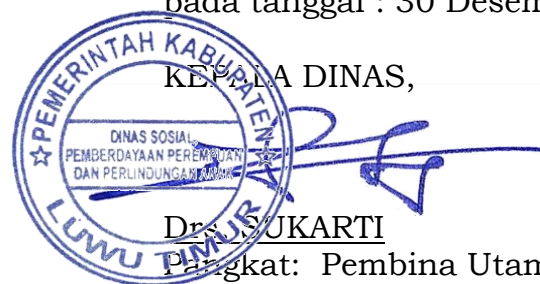






Ditetapkan di Malili
pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DINAS,



Drs. SUKARTI

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP: 19651025 199610 1 001